



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN JAKARTA

JALAN RAYA RAGUNAN NO. 30 PASAR MINGGU, JAKARTA 12540
TELEPON (021) 78839949, FAKSIMILE: (021) 7815020
WEBSITE: brmp.jakarta@pertanian.go.id

Nomor : B-251/RC.320/H.12.12/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Dua Laporan
Hal : Laporan Bulanan Maret dan Laporan Triwulan I
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta

06 April 2026

Yth.
Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor: B-581/RC/330/H.1/02/2026 tentang Penyampaian Outline Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan Kinerja dan Kegiatan Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tanggal 19 Februari 2026, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Bulanan Maret dan Laporan Kinerja Triwulan I 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta. Laporan diunggah melalui tautan: https://bit.ly/Upload_Lapbul_BRMP_2026.

Demikian, atas perkenan Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Jakarta,



Dr. Sri Sasmita Dahlan, SP, M.Si
NIP 198303192005012001

LAPORAN KINERJA BULAN MARET

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA



BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
2026

KATA PENGANTAR



Penyusunan "Laporan Bulanan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta periode Maret 2026" merupakan wujud pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang jelas, terukur, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja setiap tahunnya.

Dalam laporan ini disajikan capaian kinerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta selama bulan Maret 2026. Tahun 2026 merupakan tahun pertama bagi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta melaksanakan tugas fungsi yang baru, pasca disahkannya sebagai Unit Kerja Eselon II-b di Badan

Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP).

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP) Jakarta pada Tahun 2026 menjalankan tiga program kegiatan yaitu 1) Program nilai tambah dan daya saing industri; 2) Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas serta 3) Program dukungan manajemen.

Semoga Laporan Kinerja Bulanan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP) Jakarta ini dapat bermanfaat, baik sebagai dasar pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan maupun sebagai tolok ukur untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, 31 Maret 2026
Kepala Balai Besar,



Dr. Sri Sasmita Dahlan, SP., M.Si. *h*
NIP. 19830319 200501 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
I. PENDAHULUAN	1
II. CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	2
2.1. Capaian Kinerja Utama	2
2.2. Capaian Kinerja Strategis Lainnya	6
III. REALISASI ANGGARAN.....	8
3.1. Realisasi Anggaran	8
3.2. Alokasi Anggaran.....	8
IV. HASIL MONITORING DAN EVALUASI	9
V. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT	11
VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	13
6.1. Kesimpulan.....	13
6.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	13

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Perakitan Modernisasi Pertanian (BRMP) di wilayah, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP) Jakarta menjalankan tiga program kegiatan, yaitu 1) Program nilai tambah dan daya saing industri; 2) Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas serta 3) Program dukungan manajemen. Yang menjadi target sasaran program Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta tahun 2026 adalah: 1) Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani (Lembaga); 2.a) Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif (Teknologi); 2.b) Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif (Unit); 3) Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani (orang); 4) Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima (Nilai); serta 5) Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Berdasarkan evaluasi tingkat pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan, kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta pada bulan Maret tahun 2026 sudah dalam proses pelaksanaan untuk pemenuhan target tahunan sesuai yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja T.A. 2026.

Tantangan capaian kinerja pada tahun 2026 adalah perubahan nomenklatur organisasi dari sebelumnya Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Jakarta menjadi Badan Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Jakarta dengan tugas dan fungsi organisasi yang baru terbentuk. Tugas BBRMP yang baru adalah "*Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian*". Secara umum perbedaan dengan Tusi sebelumnya adalah, saat ini selain mendukung diseminasi penerapan standar, selain itu Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta dituntut untuk melaksanakan penerapan pertanian modern.

Permasalahan yang menjadi kendala utama dalam penerapan modernisasi pertanian spesifik lokasi di Jakarta yaitu Jakarta bukan merupakan daerah produsen karena keterbatasan lahan serta masih minimnya pemanfaatan serta penerapan teknologi baik terapan maupun modern. Meskipun demikian, tantangan Jakarta adalah mempertahankan posisinya sebagai kota global. Fokus utama adalah pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang pertanian untuk memenuhi standar tinggi, produktivitas tinggi dalam penerapan teknologi pertanian yang dibutuhkan dalam skala global.

Penerapan pertanian modern dengan pemenuhan standar di Jakarta diterapkan dalam hal budi daya tanaman, produk segar dan olahan (UMKM) selain itu mendukung program strategis mewujudkan swasembada pangan. Adapun kendala pelaku pertanian di Jakarta adalah a) sarana dan prasarana (keterbatasan lahan, masih minim penggunaan Alsintan, penggunaan varietas unggul masih belum optimal, dan sarana pascapanen yang masih manual), b) sumber daya manusia (keterbatasan informasi tentang Sistem Informasi Pertanian, SNI dan administrasi yang lemah), c). produk (masih skala kecil, kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) baku, serta kendala biaya sertifikasi).

Adapun Ruang Lingkup Kriteria Pertanian Modern yang ditargetkan BRMP adalah:

1) Penerapan Varietas Unggul Baru hasil inovasi pemuliaan tanaman; 2) Mekanisasi Pertanian dengan penggunaan Alsintan; 3) Sistem Informasi Pertanian (SIP) dengan penerapan teknologi digital; dan 4) Teknologi Pertanian diantaranya dengan mekanisasi digitalisasi seperti *smart farming* dan irigasi modern.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut maka beberapa hal dapat dilakukan antara lain:

- 1) Jangka Pendek: Sosialisasi penerapan standar di komunitas pertanian, pemetaan mutu komoditas melalui optimalisasi pendampingan dan pelatihan penerapan standar; gerakan literasi digital, koordinasi dengan Eselon I Kementan lainnya dalam upaya bantuan untuk sarana dan prasarana seperti Alsintan, benih VUB dan pupuk bagi petani; Diseminasi teknologi hasil perakitan Balai Perakitan dan Pengujian BRMP;
- 2) Jangka Menengah: Penyusunan SOP penerapan standar komoditas, fasilitasi promosi dan pemasaran bagi yang menerapkan standar; Edukasi pemanfaatan Sistem Informasi Pertanian, kolaborasi dengan stakeholder/swasta dalam mekanisasi digital seperti *smart farming*;
- 3) Jangka Panjang: Penerapan SNI pada produk segar dan olahan, Penerapan Pertanian modern bagi Petani di Jakarta sehingga dapat meningkatkan produktivitas maupun keuntungan ekonomi.

I. PENDAHULUAN

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta sebagai instansi pemerintah bertanggungjawab terhadap kinerja pencapaian Sasaran Kinerja strategisnya. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta sebagai instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dalam mendukung pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Terkait pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) sebagai salah satu unit kerja Kementan RI, tugas pokok dan fungsi seluruh UK/UPT BRMP mengacu pada Tusi BRMP yaitu menyelenggarakan "Perakitan dan modernisasi pertanian". Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta merupakan unit kerja eselon IIB dari BRMP. Dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 Kementan RI, maka kebijakan BBRMP Jakarta diarahkan untuk mendukung program strategis Kementan, Strategi Operasional, serta Strategi Pendukung. Melalui Permentan No. 39 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, BBRMP dibentuk untuk melaksanakan tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP) Jakarta menjalankan tiga program kegiatan pada tahun 2026, yaitu 1) Program nilai tambah dan daya saing industri; 2) Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas serta 3) Program dukungan manajemen. Yang menjadi target sasaran program Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta tahun 2026 berdasarkan Perjanjian Kinerja adalah: 1) Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani (Lembaga); 2.a) Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif (Teknologi); 2.b) Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif (Unit); 3) Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani (orang); 4) Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima (Nilai); serta 5) Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Adapun dalam pencapaian sasaran kinerja Balai Besar Modernisasi Pertanian tahun 2026, indikator kinerja dicapai melalui beberapa Program kegiatan pada DIPA BBPMP Jakarta T.A 2026 (Tabel 4). Indikator 1 yakni *Jumlah Lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)* akan dicapai melalui kegiatan Luas Tambah Tanam namun hingga saat ini anggaran belum tersedia; Indikator 2.a yakni *Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)* akan dicapai melalui kegiatan Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern; Indikator 2.b yakni *Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (Unit)* akan dicapai melalui kegiatan Benih Sumber Padi Spesifik lokasi dan Benih Sumber Bawang Merah spesifik lokasi; Indikator 3 yakni *Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Orang)* saat ini masih belum ada kegiatan yang menaungi; Indikator 4 yakni *Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (Nilai)* akan dicapai melalui kegiatan ZI di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta dan indikator 5 yakni *Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (Nilai)* akan dicapai melalui Layanan Manajemen keuangan.

II. CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

2.1. Capaian Kinerja Utama

Pada Tabel 1 disajikan Capaian Kinerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta Bulan Maret 2026

Tabel 1 Capaian kinerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta Bulan Maret 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan	Capaian	Kinerja (%)
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	Jumlah Lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1	Lembaga	0	0
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	1	Teknologi	0	0
		Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (Unit)	8	Unit	0	0
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern (Orang)	125	Orang	15	12
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (Nilai)	87.68	Nilai (0-100)	Proses Penilaian Mandiri	0
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (Nilai)	95.02	Nilai (0-100)	75	78.93

Dari Tabel 1 memperlihatkan bahwa capaian kinerja BBPMP Jakarta masih dalam proses pemenuhan target tahunan untuk semua Indikator Kinerja Utama. Indikator 1, 2.a, 2.b dalam proses pemenuhan target sehingga pada bulan Maret Kinerja masih 0%. Indikator 3 memperlihatkan kinerja sebesar 12%, hal ini dicapai melalui kegiatan pendampingan kepada petani di lapangan seperti pendampingan saat kegiatan Luas Tambah Tanam. Indikator 4 masih dalam proses penilaian mandiri, dan pada bulan Maret telah disusun Rencana Kerja Tim ZI tahun 2026 sebagai dasar Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan untuk satu tahun ke depan. Indikator 5 yakni Nilai IKPA Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta bulan Maret 2026 sebesar 75 sehingga Nilai Capaian Kinerja bulan Maret 2026 adalah 78,93%.

Indikator 1. Jumlah Lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)

Pencapaian target PK Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta yakni "*Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani*" dicapai melalui kegiatan Program Strategis Kementerian Pertanian, berupa kegiatan Luas Tambah Tanam untuk peningkatan produksi padi dan luas tanam di Provinsi Jakarta dengan penerapan standar diantaranya adalah SNI IndoGAP, maupun kegiatan perbenihan padi yang rencananya akan menerapkan standar benih padi inbrida. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan partisipatif kepada Kelompok Tani yang mendapatkan pendampingan. Dalam SNI IndoGap dipraktikkan cara berbudidaya yang baik mulai dari persiapan benih, pengolahan lahan, pemupukan berimbang, pengendalian hama dan penyakit, serta pascapanen. Lembaga Penerap yang akan mendapatkan pendampingan perbenihan padi adalah Poktan Bangkit Bersama di wilayah Jakarta Utara.

Indikator 2.a. Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)

Pencapaian target Sasaran kedua PK Balai Besar Modernisasi Pertanian Jakarta yakni "*Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif*" dengan Indikator Kinerja Jumlah teknologi Pertanian yang adaptif dengan output 1 teknologi dapat dicapai melalui Kegiatan Program Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta melalui Teknologi Pertanian yang Adaptif akan menjadi pendamping petani untuk mengadaptasikan teknologi budi daya padi PM AAS yang dikombinasikan dengan penggunaan padi sehat. Kegiatan ini akan melibatkan kerjasama dengan instansi di Dinas KPKP Jakarta seperti Pusbangbenih dan Proteksi Tanaman, PPSHP untuk sertifikasi benih, serta kelompok tani untuk kerja sama budi daya produksi benihnya.

Indikator kinerja ini diukur melalui capaian jumlah teknologi pertanian adaptif yang dihasilkan yakni 1 teknologi, melalui kegiatan Perekayasa dan Perakitan Teknologi adaptif. Capaian kegiatan tersebut pada bulan Maret 2026 adalah sebagai berikut:

a. Survey Calon Lokasi Calon Petani ke Poktan Karya Tani, Jakarta Barat

Kelompok tani yang disurvei adalah Karya Tani yang berada di wilayah Pegadungan, memiliki garapan lahan sawah lebih dari 4 Ha yang sebagian wilayahnya masuk ke daerah Tangerang. Hanya 1 Ha yang masuk wilayah Provinsi Jakarta. Karakteristik yang disurvei adalah kelayakan lahan untuk kegiatan produk teknologi terapan pertanian adaptif dan modern, mengidentifikasi ketersediaan air dan infrastruktur irigasi.

b. Mengikuti Sosialisasi Tentang Teknologi PM AAS

Sekretaris BRMP menyampaikan agar budi daya padi metode PM AAS segera dilaksanakan oleh seluruh BRMP pada bulan April, dengan pembiayaan berasal dari kegiatan perekayasa.



Gambar 1. Kegiatan Teknologi Terapan Pertanian Adaptif

Indikator 2.b. Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (Unit)

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta pada tahun 2026 mendapat mandat menghasilkan benih sumber sebanyak 8 ton, yang terdiri dari 7 ton benih padi dan 1 ton benih bawang merah. Kolaborasi menjadi langkah penting yang dilakukan BBPMP Jakarta untuk memenuhi mandat tersebut. Capaian kegiatan ini pada bulan Maret dalam tahap pemenuhan capaian. Capaian kegiatan yang sudah dicapai hingga bulan Maret tahun 2026 sebagai berikut.

a) Koordinasi dengan Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman

Koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan perbenihan dilakukan ke Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman (P2BPT) Provinsi DKI Jakarta. Tim ditemui langsung oleh Kepala Pusat P2BPT, Hendra Juniarto beserta KTU dan staf terkait. Pada agenda ini disampaikan terkait perubahan nomenklatur BRMP Jakarta yang telah menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta. Koordinasi ini mengupayakan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan perbenihan, mengingat BBPMP Jakarta tidak memiliki KP sendiri.

b) Koordinasi dengan kelompok tani penangkar, calon kooperator kegiatan perbenihan padi

BBPMP Jakarta melakukan kunjungan koordinasi ke Kelompok Tani (Poktan) Bangkit Bersama di Rorotan, Jakarta Utara dalam rangka persiapan kegiatan produksi benih sumber padi spesifik lokasi di Wilayah Jakarta. Kegiatan koordinasi ini bertujuan memperkuat program perbenihan padi serta memastikan kesiapan kelompok tani dalam melaksanakan produksi benih padi Inpari 32 dengan kelas benih SS (label ungu). Perwakilan Poktan Bangkit Bersama, Rabat Sihabudin sangat terbuka dan siap berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

c) Penyusunan draft Kerjasama kegiatan perbenihan dengan Pusbangbenih

Maksud perjanjian kerja sama ini adalah bersama-sama memanfaatkan sumber daya yang ada pada BBPMP Jakarta dan P2BPT dalam mendukung produksi benih padi inbrida varietas Inpari 30 kelas benih pokok (BP) tersertifikasi sejumlah 5 (lima) ton. Tujuan perjanjian kerja sama adalah untuk menyinergikan program dan kegiatan dalam memproduksi benih padi dan distribusi hasil produksi benih padi inbrida.



Gambar 2. Kegiatan Perbenihan Padi

Indikator 3. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Orang)

Indikator kinerja ini diukur melalui capaian Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, *smart farming*, dan modern (Orang). Capaian kegiatan tersebut pada bulan ini masih dalam tahap pelaksanaan pemenuhan capaian.

Dari hasil baseline survei yang telah dilakukan pada tahun 2025, terhadap 25 orang petani didapatkan bahwa penerapan dan pemanfaatan teknologi mekanisasi seperti alsintan masih cukup rendah hanya sebesar 32% dan sisanya belum memanfaatkan. Begitu pula dengan penggunaan pertanian modern hanya sekitar 44% petani yang menggunakannya. Hal ini dapat dijadikan data dasar dalam perencanaan kegiatan Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, *smart farming*, dan modern (Orang) pada tahun 2026.

Target output petani yang sudah menerapkan teknologi yakni 125 orang dan diharapkan target output dapat tercapai. Hal ini karena Visi BRMP adalah "Mewujudkan Lembaga Unggul dalam Perekayasaan dan Perakitan Teknologi Pertanian Terapan Modern yang Inovatif dalam Mendukung Pertanian Maju". Maka kehadiran BRMP dapat meningkatkan jumlah petani yang menerapkan teknologi modern setiap tahunnya. Diharapkan seluruh kriteria (4) teknologi dapat dimanfaatkan oleh setiap petani. Hal ini diharapkan dapat berdampak kepada peningkatan usaha, kemudahan dalam praktik budidaya serta menghasilkan produk pertanian yang unggul.

Indikator 4. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (Nilai)

Pada bulan ini, indikator Nilai ZI masih dalam tahap proses penilaian mandiri, yakni dengan mengumpulkan evidence serta bukti-bukti untuk kelengkapan LKE. Capaian evidence ZI pada bulan Maret adalah sebagai berikut:

- a) Pada bulan Maret 2026 telah dilakukan penyusunan rencana kerja ZI dan Sosialisasi rencana kerja ZI. Senin, 2 Maret 2026 dalam rangka memperkuat komitmen menuju tata kelola pemerintah yang bersih, berintegritas tinggi, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara cepat dan akuntabel, BRMP Jakarta laksana rapat penyusunan rencana kerja pembangunan zona integritas (ZI). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).



Gambar 3. Sosialisasi Rencana Kerja ZI dan Penandatanganan Pakta Integritas

Indikator 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (Nilai)

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta per 31 Maret 2026 adalah sebesar 75. Nilai ini diperoleh dari Nilai Revisi DIPA (10%) sebesar 100,00; Nilai Deviasi Halaman III DIPA (15%) sebesar 100; Nilai Penyerapan Anggaran (20%) sebesar 100,00; Nilai Pengelolaan UP dan TUP (10%) sebesar 100; dan Nilai Capaian Output (25%) sebesar 0,00.

KEMENTERIAN KELUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN
DIPA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode akun	Kode Bak	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Tipe	Kategori Beban	Capaian DIPA (Penganggaran)	Nilai Aktif, Nilai Total, Nilai Saldo
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Angka	Penggunaan Anggaran	Saluran Kompetensi	Penggunaan Teguhan	Penggunaan UP dan TUP	Nilai Angka	Capaian Output	Nilai Angka				
1	2025	511	000	000000	Saluran Komptensi		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar 4 . Indikator pelaksanaan anggaran Satker

2.2. Capaian Kinerja Strategis Lainnya

Capaian kinerja strategis lainnya yang diperoleh BRMP Jakarta pada bulan Maret adalah capaian target dari kegiatan Pendampingan Program Strategis/Swasembada Pangan Kementerian Pertanian (Luas Tambah Tanam Padi). Ditinjau dari persentase capaian terhadap target kesanggupan, Provinsi Jakarta berada pada zona merah dengan capaian realisasi sebesar 2,93 % atau hanya sebesar 1 Ha dari target Maret sebesar 34,12 Ha, yang diperoleh dari penambahan pertanaman di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Rendahnya penambahan pertanaman di Jakarta pada bulan Maret disebabkan masih tingginya curah hujan dan banyaknya daerah persawahan Jakarta yang tergenang. Selain itu terdapat alih fungsi lahan sawah di beberapa lokasi, baik di Jakarta Utara, Jakarta Timur, maupun Jakarta Barat, dengan luasan yang beralih fungsi beragam di setiap wilayah. Lahan Poktan Tani Karya Siaga Jakarta Utara seluas ± 5 Ha akan dialihfungsikan menjadi rumah susun, lahan sawah Halim Farm beralih fungsi menjadi Barak TNI AU seluas ± 0.5-1 Ha, dan lahan Hizbul Wathon Jakarta Barat juga akan beralih fungsi. Untuk lahan sawah lainnya, umumnya hanya persemaian yang dilaksanakan pada bulan Maret, dengan target tanam pada bulan April. Penyaluran benih padi varietas unggul Inpari telah dilaksanakan kepada Kelompok Tani di Jakarta Utara. Benih yang disalurkan merupakan hasil Diseminasi dari BRMP Padi

Sukamandi. Kehadiran benih ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kualitas gabah yang dihasilkan petani. Pada bulan Maret juga telah dilakukan pendampingan oleh Penyuluh Pertanian kepada Gapoktan Rorotan Jaya melalui pertemuan kelompok dengan Babinsa dan Bulog dalam rangka kegiatan Serap Gabah. Bulog berkomitmen untuk menyerap Gabah dari petani. Pendampingan juga dilakukan untuk kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi.

III. REALISASI ANGGARAN

3.1 Realisasi Anggaran

Dari hasil monitoring dan evaluasi diperoleh nilai Realisasi Belanja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta per 31 Maret 2026 adalah sebesar Rp. 1.229.616.018,- (20.75%) yang terdiri dari Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 733.588.352,- (22.79%) dan Realisasi Belanja Barang sebesar Rp. 496.027.666,- (18.32%).

Tabel 2 Pagu dan Realisasi Belanja Per 31 Maret 2026

Uraian	2026		
Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.218.354.000	733.588.352	22.79
Belanja Barang	2.707.423.000	496.027.666	18.32
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Kotor	5,925,777,000	1.229.616.018	20.75
Pengembalian Belanja	0	0	
Total Belanja	5.925.777.000	1.229.616.018	20.75

Realisasi Pendapatan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta per 31 Maret 2026 adalah sebesar Rp. 762.500 yang berasal dari Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu.

Tabel 3 Realisasi Pendapatan Per Akun Per 31 Maret 2026

Akun	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan Peternakan dan Budidaya	1.000.000	0	0,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	762.500	∞
Jumlah		1.000.000	762.500	76,25

3.2 Alokasi Anggaran

Pada Tabel 4 disajikan Program dan anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta T.A 2026

Tabel 3. Program dan anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta T.A 2026

No	Program/Kegiatan	Anggaran	
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	730.000,-
	a. Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Rp	730.000,-
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	251.967.000-
	a. Benih Sumber Bawang Merah Spesifik Lokasi	Rp.	38.211.000,-
	b. Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	Rp.	110.627.000,-
	c. Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern	Rp.	103.129.000,-
3	Program Dukungan Manajemen	Rp.	5.673.080.000,-
	a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Rp.	5.673.080.000,
Total		Rp.	5.925.777.000,-

IV. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Tabel 4 Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bulan Maret 2026

No.	Indikator Kinerja	Capaian dan Deviasi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Antisipasi Risiko
1	Jumlah Lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	Telah dilaksanakan pendampingan LTT di 3 wilayah Jakarta Capaian LTT sampai bulan Maret 29,4	Sosialisasi SIP melalui media sosial (medsos) didorong oleh tingginya penetrasi internet, kemudahan akses, serta efisiensi komunikasi.	-Belum adanya anggaran kegiatan yang menaungi indikator kinerja 1 -Terbatasnya sarana dan prasarana	- Karena saat ini Indikator ini belum ada kegiatan yang menaungi maka untuk pencapaian output dilakukan dengan Sosialisasi SIP melalui medsos dan diharapkan dapat terdiseminasikan kepada Lembaga Penerap
2	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	- Sudah dilakukan survey petani kooperator - Sosialisasi penggunaan teknologi Padi Arkansas	Didukung oleh Kementerian	-Keterbatasan dan Alih Fungsi Lahan: Ini adalah hambatan utama. Lahan sawah yang tersisa (seperti di Jakarta Utara atau Timur) terus tergerus sehingga skala produksi benih menjadi kecil. -Kondisi Lingkungan yang Menantang: Kualitas air yang tercemar limbah industri/domestik serta fenomena <i>Urban Heat Island</i>	-Penggunaan benih sehat yang memiliki potensi hasil tinggi -Diperlukan varietas yang memiliki ambang batas suhu kritis yang lebih tinggi untuk fase pembungaan -Pengendalian hama penyakit menggunakan teknik yang terpadu
3	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern (Orang)	-Identifikasi petani Provinsi Jakarta yang aktif dan masuk ke dalam SIMLUHTAN	Tersedianya data SIMLUHTAN untuk mengidentifikasi Petani di Provinsi Jakarta	PEDUM kegiatan ini belum disusun oleh Sekretariat BRMP sehingga prosedur pelaksanaan masih menggunakan Base data Tahun 2025	-Mengidentifikasi teknologi modern yang sesuai dengan kondisi petani Jakarta

No.	Indikator Kinerja	Capaian dan Deviasi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Antisipasi Risiko
4	Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (Unit)	Sudah dilakukan Koordinasi dengan Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman	Dinas KPP mendukung kegiatan Benih Sumber sudah tersedia	-Petani akan mulai tanam di Bulan April karena pada bulan Februari-Maret intensitas hujan masih tinggi sehingga berpotensi akan menyebabkan terjadi banjir dan padi terendam - Masih adanya lahan yang masih dalam proses menunggu panen sehingga belum bisa mulai diolah	-Penanaman padi dilakukan pada bulan dengan intensitas hujan rendah -Pengunaan benih padi unggul, -Persiapan dan cek kelainan alisntan untuk pengolahan lahan -Persiapan sarana dan prasarana kebutuhan tanam
5	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (Nilai)	Sudah dilaksanakan sosialisasi rencana kerja ZI tahun 2026	Sosialisasi Rencana Kerja ZI tahun 2026	Pembangunan ZI masih dipersepsikan sebagai kegiatan administratif dan berorientasi pada penentuan penilaian, sehingga perubahan perilaku dan budaya kerja belum sepenuhnya terinternalisasi	Penguatan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, yang diwujudkan melalui keteladanan pimpinan, penetapan kebijakan internal yang mendukung integritas, serta pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program ZI.
6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (Nilai)	Nilai IKPA bulan Maret sebesar 70,38. Nilai tersebut masih jauh dari target nilai IKPA yg tertera di PK kita yg sebesar 95,02.	-Deviasi halaman III DIPA, Penyerapan anggaran, dan capaian output	Rencana penyerapan dana bulanan tidak sesuai dengan realisasi penyerapan anggaran perbulan	Meningkatkan Penyerapan Anggaran dan memastikan Nilai Deviasi Halaman III DIPA bulan-bulan berikutnya < 5%.

V. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Tabel 5 Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut Indikator Kinerja Utama Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta Bulan Maret 2026

No.	Indikator Kinerja	Permasalahan Utama	Upaya Penyelesaian	Rencana Tindak Lanjut
1	Jumlah Lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	Belum adanya anggaran kegiatan yang menaungi indikator kinerja 1	Penyusunan rencana kerja dan desk study kegiatan telah dilaksanakan	Akan diupayakan pencapaian output melalui kolaborasi dengan kegiatan lainnya
2	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	Arahan kebijakan kegiatan sangat dinamis	kegiatan mengikuti arahan BRMP	Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai output
3	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, <i>smartfarming</i> , dan modern (Orang)	Belum adanya anggaran kegiatan yang menaungi indikator kinerja 1	Penyusunan rencana kerja dan desk study kegiatan telah dilaksanakan	Akan diupayakan pencapaian output melalui kolaborasi dengan kegiatan lain, serta akselerasi informasi modernisasi pertanian melalui zoom
4	Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (Unit)	-Adanya kebijakan direktif presiden berdampak pada pengalihan Sebagian anggaran ke RO Khusus -Adanya perubahan nomenklatur unit kerja berdampak kepada adanya perubahan target output dan revisi output masih belum selesai	Sedang dilakukan pengajuan revisi output kegiatan	Persiapan sarana prasarana dan pelaksanaan kegiatan di lapangan untuk mencapai output
5	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (Nilai)	Pembangunan ZI masih dipersepsikan sebagai kegiatan administratif dan berorientasi pada pemenuhan penilaian, sehingga perubahan perilaku dan budaya kerja belum sepenuhnya terinternalisasi Sehingga pencapaian kinerja belum optimal	Penguatan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, yang diwujudkan melalui keteladanan pimpinan, penetapan kebijakan internal yang mendukung integritas, serta pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program ZI.	- Tindak lanjut pemenuhan bukti evidence/dokumen kelengkapan LKE ZI - Penguatan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, yang diwujudkan melalui keteladanan pimpinan, penetapan kebijakan internal yang mendukung integritas, serta pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program ZI.

6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (Nilai)	Nilai capaian output belum bisa diinput sehingga nilai IKPA belum optimal	Menunggu nilai capaian output bisa diinput pada aplikasi SAKTI	Meningkatkan antara lain 1). Aspek Perencanaan Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA; Deviasi Halaman III DIPA, 2). Aspek Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran yaitu penyerapan anggaran; belanja kontraktual; penyelesaian tagihan; pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP); dan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM), 3). Penilaian aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output.
---	--	---	--	---

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Hasil monitoring dan evaluasi bulan Maret 2026 terhadap Capaian Indikator Kinerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta didapatkan bahwa saat ini masih dalam tahap proses pemenuhan target capaian. Capaian indikator Kinerja pada bulan Maret 2026 sebagian besar sudah mulai dalam tahap pelaksanaan kegiatan. Nilai IKPA Maret BBPMP Jakarta masih sebesar 75, dengan persentase kinerja hanya sebesar 78.93%. Beberapa kegiatan telah melakukan koordinasi dan didapatkan CPCL untuk ditetapkan sebagai petani kooperator.

Realisasi Belanja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta per 31 Maret 2026 adalah sebesar Rp. 1.229.616.018 (20.75%) yang terdiri dari Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 733.588.352 (22,79%) dan Realisasi Belanja Barang sebesar Rp. 496.027.666 (18,32%).

Beberapa kendala yang dihadapi pada bulan Maret adalah masih adanya indikator kinerja yang belum memiliki anggaran yang menaungi. Selain itu arahan program dan anggaran kegiatan juga masih sangat dinamis. Untuk nilai IKPA masih di bawah nilai target dapat disebabkan rencana penyerapan dana bulanan tidak sesuai dengan realisasi penyerapan anggaran perbulan.

6.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Dalam rangka peningkatan Capaian Indikator Kinerja di bulan selanjutnya adalah adanya keberlanjutan peran dan keterlibatan Pimpinan dalam memberikan arahan maupun kebijakan dalam pencapaian output. Adapun beberapa tindak lanjut untuk bulan selanjutnya diantaranya adalah akan diupayakan pencapaian output diperoleh dari sumber anggaran kegiatan lainnya, penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai output. Peningkatan nilai IKPA dan Realisasi anggaran di bulan selanjutnya adalah dengan meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan agar relevan.

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA



**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
2026**

KATA PENGANTAR



Penyusunan "Laporan Kinerja Triwulan I Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta Tahun 2026" merupakan wujud pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang jelas, terukur, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja setiap tahunnya. Dalam laporan ini disajikan capaian kinerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta selama Periode Triwulan I Tahun 2026.

Tahun 2026 merupakan tahun pertama bagi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta melaksanakan tugas fungsi yang baru, pasca disahkannya sebagai Unit Kerja Eselon II-b baru di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP).

Semoga Laporan Kinerja Triwulan I Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP) Jakarta Tahun 2026 ini dapat bermanfaat, baik sebagai dasar pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan maupun sebagai tolok ukur untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, 31 Maret 2026
Kepala Balai Besar,



Dr. Sri Sasmita Dahlan, SP, M.Si. *u*
NIP. 19830319-200501 2 001

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Perakitan Modernisasi Pertanian (BRMP) di wilayah, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP) Jakarta menjalankan tiga program kegiatan, yaitu 1) Program nilai tambah dan daya saing industri; 2) Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas serta 3) Program dukungan manajemen. Yang menjadi target sasaran program Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta tahun 2026 adalah: 1) Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani (Lembaga); 2.a) Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif (Teknologi); 2.b) Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif (Unit); 3) Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani (orang); 4) Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima (Nilai); serta 5) Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Berdasarkan evaluasi tingkat pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan, kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta pada bulan Triwulan I tahun 2026 sedang dalam proses pemenuhan target tahunan sesuai yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja T.A. 2026.

Tantangan capaian kinerja pada tahun 2026 adalah perubahan organisasi dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) dengan tugas dan fungsi organisasi yang baru terbentuk. Tusi BRMP yang baru adalah *"melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian"*. Secara umum perbedaan dengan Tusi sebelumnya adalah, saat ini selain mendukung diseminasi penerapan standar, selain itu Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta dituntut untuk melaksanakan penerapan pertanian modern. Menurut data BPS tahun 2023 terkait Penerapan Teknologi Modern dalam Pertanian (Alsintan dan/atau Teknologi Digital) didapatkan bahwa, yakni terdapat 55.13% petani yang belum menggunakan teknologi dan baru 44.87% petani yang sudah menggunakan teknologi Pertanian. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta untuk dapat berperan dalam peningkatan penggunaan teknologi modern oleh petani.

Permasalahan yang menjadi kendala utama dalam penerapan modernisasi pertanian spesifik lokasi di Jakarta yaitu Jakarta bukan merupakan daerah produsen karena keterbatasan lahan serta masih minimnya pemanfaatan serta penerapan teknologi baik terapan maupun modern. Meskipun demikian, tantangan Jakarta adalah mempertahankan posisinya sebagai kota global. Fokus utama adalah pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang pertanian untuk memenuhi standar tinggi, produktivitas tinggi dalam penerapan teknologi pertanian yang dibutuhkan dalam skala global.

Tantangan capaian kinerja pada tahun 2026 adalah perubahan nomenklatur organisasi dari sebelumnya Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Jakarta menjadi Badan Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian (BBPMP) Jakarta dengan tugas dan fungsi organisasi yang baru terbentuk. Tugas BBPMP yang baru adalah *"Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian"*. Secara umum perbedaan dengan Tusi sebelumnya adalah, saat ini selain mendukung diseminasi penerapan standar, selain itu Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta dituntut untuk melaksanakan penerapan pertanian modern. Menurut data BPS tahun 2023 terkait Penerapan Teknologi Modern dalam Pertanian (Alsintan dan/atau Teknologi Digital) didapatkan bahwa, yakni terdapat 55.13% petani yang belum menggunakan teknologi dan baru 44.87% petani yang sudah menggunakan teknologi Pertanian. Hal ini menjadi tantangan bagi Badan baru maupun Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian

Jakarta untuk dapat berperan dalam peningkatan penggunaan teknologi modern oleh petani.

Permasalahan yang menjadi kendala utama dalam penerapan modernisasi pertanian spesifik lokasi di Jakarta yaitu Jakarta bukan merupakan daerah produsen karena keterbatasan lahan serta masih minimnya pemanfaatan serta penerapan teknologi baik terapan maupun modern. Meskipun demikian, tantangan Jakarta adalah mempertahankan posisinya sebagai kota global. Fokus utama adalah pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang pertanian untuk memenuhi standar tinggi, produktivitas tinggi dalam penerapan teknologi pertanian yang dibutuhkan dalam skala global.

Penerapan pertanian modern dengan pemenuhan standar di Jakarta diterapkan dalam hal budidaya tanaman, produk segar dan olahan (UMKM) selain itu mendukung program strategis mewujudkan swasembada pangan. Adapun kendala pelaku pertanian di Jakarta adalah a) sarana dan prasarana (keterbatasan lahan, masih minim penggunaan alsintan, penggunaan varietas unggul masih belum optimal, dan sarana pascapanen yang masih manual), b) sumber daya manusia (keterbatasan informasi tentang Sistem Informasi Pertanian, SNI dan administrasi yang lemah), c) produk (masih skala kecil, kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) baku, serta kendala biaya sertifikasi).

Adapun Ruang Lingkup Kriteria Pertanian Modern yang ditargetkan BRMP adalah:

1) Penerapan Varietas Unggul Baru merupakan hasil inovasi pemuliaan tanaman; 2) Mekanisasi Pertanian dengan penggunaan Alsintan; 3) Sistem Informasi Pertanian (SIP) dengan penerapan teknologi digital; dan 4) Teknologi Pertanian diantaranya dengan mekanisasi digitalisasi seperti *smart farming* dan irigasi modern.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut maka beberapa hal dapat dilakukan antara lain:

- 1) Jangka Pendek: Sosialisasi penerapan standar di komunitas pertanian, pemetaan mutu komoditas melalui optimalisasi pendampingan dan pelatihan penerapan standar; gerakan literasi digital, koordinasi dengan Eselon I Kementerian lainnya dalam upaya bantuan untuk sarana dan prasarana seperti alsintan, benih VUB dan pupuk bagi petani; Diseminasi teknologi hasil perakitan Balai Perakitan dan Pengujian BRMP;
- 2) Jangka Menengah: Penyusunan SOP penerapan standar komoditas, fasilitasi promosi dan pemasaran bagi yang menerapkan standar; Edukasi pemanfaatan Sistem Informasi Pertanian, kolaborasi dengan stakeholder/swasta dalam mekanisasi digital seperti *smart farming*;
- 3) Jangka Panjang: Penerapan SNI pada produk segar dan olahan, Penerapan Pertanian modern bagi Petani di Jakarta sehingga dapat meningkatkan produktivitas maupun keuntungan ekonomi.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Organisasi	1
1.3. Tantangan dan Peran Strategis	3
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
2.1. Rencana Strategis Organisasi	4
2.2. Perjanjian Kinerja	5
III. AKUNTABILITAS KINERJA	7
3.1. Capaian Kinerja Utama	7
3.2. Capaian Kinerja Strategis Lainnya	14
3.3. Realisasi Anggaran	18
3.4. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya	18
IV. PENUTUP	23
4.1. Ringkasan Capaian Kinerja	23
4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja	23

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Keragaan pegawai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta berdasarkan jabatan dan jenjang pendidikan tahun 2026	2
Tabel 2. Keadaan pegawai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta berdasarkan jenjang golongan dan jabatan tahun 2026	3
Tabel 3. Target kinerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta 2026	5
Tabel 4. Program dan anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta T.A 2026	6
Tabel 5. Capaian kinerja Triwulan I tahun 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta	7
Tabel 6. Capaian jumlah Lembaga Penerap Standar tahun 2026	8
Tabel 7. Teknologi dan SNI yang didiseminasikan BBPMP Jakarta periode Januari s.d. Maret 2026	8
Tabel 8. Capaian jumlah teknologi pertanian yang adaptif tahun 2026	9
Tabel 9. Capaian Jumlah Benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan tahun 2026	11
Tabel 10. Capaian jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming dan modern	12
Tabel 11. Perbandingan capaian nilai zona integritas BBPMP Jakarta Tahun 2023-2026	2
Tabel 12. Layanan Narasumber Bimbingan Teknis/Pelatihan BBPMP Jakarta Periode Januari sd Maret 2026	4
Tabel 13. Layanan Magang/Praktik Kerja Lapangan Periode Januari s.d. Maret 2026	5
Tabel 14. Layanan Kunjungan Taman Agro Standar BBPMP Jakarta Periode Januari-Maret 2026	5
Tabel 15. Laporan rakapitulasi penerimaan gratifikasi periode Januari s.d Maret 2026	9
Tabel 16. Hasil rekapitulasi WBS lingkup BBPMP Jakarta Januari s.d. Maret 2026	10
Tabel 17. Laporan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Periode Januari s.d Maret 2026	11
Tabel 18. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi BBPMP Jakarta Triwulan I/2026	11
Tabel 19. Nilai Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan Triwulan I/2026	12
Tabel 20. Mutu Pelayanan BBPMP Jakarta Periode Januari s.d. Maret 2026	13
Tabel 21. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPMP Jakarta Per 31 Maret 2026	13
Tabel 22. Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan (IKPA) Tahun 2024 s.d. Tahun 2026 (Triwulan I)	14
Tabel 23. Luas lahan sawah garapan petani di Jakarta dengan Target LTT tahun 2026	15
Tabel 24. Capaian Luas Tambah Tanam Provinsi Jakarta Periode Januari s.d Maret 2026	16
Tabel 25. Luas panen serta jumlah produksi padi Provinsi Jakarta Januari-Maret 2026	17
Tabel 26. Pagu dan Realisasi Belanja Per 31 Maret 2026	18
Tabel 27. Realisasi Pendapatan Per Akun Per 31 Maret 2026	18
Tabel 28. Rincian revisi anggaran per 31 Maret tahun 2026	19

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kegiatan Perekayasaan dan Perakitan Teknologi Pertanian Adaptif	10
Gambar 2. Kegiatan Perbenihan Padi	11
Gambar 3. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Per 31 Maret 2026	14
Gambar 4. Monitoring LTT di Jakarta Utara	16
Gambar 5. Monitoring LTT di Jakarta Barat	17
Gambar 6. Monitoring LTT di Jakarta Timur	17

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Struktur organisasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta tahun 2026	25
Lampiran 2. Tim Penyusun Laporan Kinerja Balai tahun 2026	26
Lampiran 3. SOP Laporan Kinerja BBPMP Jakarta	28
Lampiran 4. Penetapan Perjanjian Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta T.A. 2026 (awal)	29
Lampiran 5. Manual IKU Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta 2026	31
Lampiran 6. Rencana Aksi BBPMP Jakarta 2026	32
Lampiran 7. Surat edaran Setjen Kementan tentang Kriteria Pencapaian Kinerja	34

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai peraturan penerapan akuntabilitas yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementan RI diwajibkan untuk:

1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.
2. Menyampaikan Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun kepada Menteri Pertanian melalui Sekretariat Jenderal Kementan.

Atas dasar hal-hal di atas, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementan RI sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2025 yang mencakup target seluruh Satker lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementan RI, salah satunya adalah Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta. Dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta tahun 2026 sebagai wujud pertanggungjawaban atas mandat yang diemban. Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta tahun 2026, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementan RI meliputi:

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Organisasi

Melalui Peraturan Presiden RI Nomor 02 Tahun 2025 tentang Kementerian Pertanian tanggal 8 Januari 2025, Badan Perakitan Modernisasi (BRMP) telah resmi lahir sebagai salah satu unit kerja baru di lingkungan Kementerian Pertanian menggantikan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang mempunyai tugas pokok "*Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Penerapan Hasil Perakitan dan Perekayasaan Paket Teknologi Spesifik Lokasi, serta Modernisasi Pertanian*". Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Balai Besar Penerapan Modernisasi Jakarta memiliki fungsi dalam hal:

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- b. Pelaksanaan koordinasi di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- c. Pelaksanaan identifikasi dan verifikasi kebutuhan teknologi, perekayasaan, pengujian, diseminasi, penerapan paket teknologi spesifik lokasi, dan model pertanian modern;
- d. Pelaksanaan pengujian, diseminasi, pengembangan dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
- e. Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, sertifikasi benih/bibit, dan penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan program pembangunan pertanian;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- h. Pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian

Secara struktural, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar dan didukung oleh Kepala Bagian Tata Usaha serta Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 128/Kpts./HK.150/M/02/2026 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian. Kelompok Substansi dan Tim kerja pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Jakarta meliputi 1) Kelompok Program dan Pengujian dengan Tim Kerja: a) Tim Kerja Program dan Evaluasi; dan b) Tim Kerja Pengujian Teknologi Spesifik Lokasi; 2) Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian dengan Tim Kerja: a) Tim Kerja Pendampingan Wilayah I dan b) Tim Kerja Pendampingan Wilayah II; 3) Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian dengan Tim Kerja: a) Tim Kerja Penerapan dan Diseminasi dan b) Tim Kerja Pengelolaan Kerjasama, Layanan dan Penilaian Kesesuaian; 4) Bagian Tata Usaha dengan Tim Kerja: a) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia; b) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga dan c) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara. Lingkup BBPMP Jakarta terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Jabatan Fungsional di BBPMP Jakarta terdiri dari Analis Standardisasi dan Penyuluh Pertanian, Pengawas Benih Tanaman, Pustakawan serta Pranata SDM Terampil. Struktur Organisasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta Triwulan I Tahun 2026 disajikan pada **Lampiran 1**.

Sumber kekuatan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta diantaranya adalah dalam hal dukungan sumberdaya manusia (SDM), baik kuantitasnya, maupun kualitas dan kinerjanya. Jumlah pegawai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta pada tahun 2026 sebanyak 32 orang PNS serta 3 orang tenaga PPPK sebagai pustakawan, Pranata SDM Terampil dan Pranata Komputer Ahli Pertama. Selain itu, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta dibantu oleh 11 orang PPPK Paruh Waktu dan 3 orang PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Keragaan pegawai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta pada tahun 2026 disajikan pada **Tabel 1** dan **2**. Tim penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2026 disajikan pada **Lampiran 2** dan SOP Laporan Kinerja pada **Lampiran 3**.

Tabel 1. Keragaan pegawai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta berdasarkan jabatan dan jenjang pendidikan tahun 2026

Bidang Tugas	Tingkat Pendidikan						Jumlah
	S3	S2	S1	D3	SMA	≤ SLTA	
Pejabat Struktural	1	1	0	0	0	0	2
Pejabat Fungsional:							
• Analis Standardisasi	1	9	3	0	0	0	13
• Penyuluh Pertanian	0	3	2	0	0	0	5
• Pengawas Benih Tanaman	0	1	1	0	0	0	2
• Pustakawan*	0	0	1	0	0	0	1
• Pranata SDM Aparatur*	0	0	0	1	1	0	2
• Pranata Komputer*	0	0	1	0	0	0	1
Petugas Belajar	0	0	0	0	0	0	0
Fungsional Umum	0	0	1	2	5	1	9
Jumlah	2	13	9	3	7	1	35

Tabel 2. Keadaan pegawai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta berdasarkan jenjang golongan dan jabatan tahun 2026

Bidang Tugas	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Pejabat Struktural	0	0	1	1	2
Pejabat Fungsional:					
• Analis Standardisasi	0	0	13	0	13
• Penyuluh Pertanian	0	0	3	2	5
• Pengawas Benih Tanaman	0	0	2	0	2
• Pustakawan*	0	0	1	0	1
• Pranata SDM Terampil*	0	1	1	0	2
Pranata Komputer*	0	0	1	0	1
Petugas Belajar	0	0	0	0	0
Fungsional Umum	0	3	6	0	9
Jumlah	0	4	28	3	35

Selain dukungan sumber daya manusia, dalam menjalankan Tupoksinya, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta didukung oleh sumber dana utama yang berasal dari dana APBN yang tertera dalam DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta T.A. 2026 dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.925.777.000 yang digunakan untuk membiayai program utama yaitu 1) Program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp. 730.000; 2) Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp. 251.967.000 serta 3) Program dukungan manajemen sebesar Rp. 6.673.080.

1.3 Tantangan dan Peran Strategis

Tantangan terbesar pertanian perkotaan adalah mengembangkan pertanian perkotaan yang modern dengan optimalisasi sumber daya yang tersedia, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Peran strategis BBPMP Jakarta dalam menjawab tantangan pengembangan pertanian perkotaan tersebut adalah menyediakan dan mendampingi penerapan paket teknologi dan standar pertanian spesifik lokasi yang berdaya guna dan memberikan manfaat optimum untuk peningkatan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian di wilayah Jakarta, sehingga pertanian perkotaan Jakarta akan mampu menjadi teladan pertanian perkotaan berskala nasional.

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Terkait pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) sebagai salah satu unit kerja Kementan RI, tugas pokok dan fungsi seluruh UK/UPT BRMP mengacu pada Tusi BRMP yaitu menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian, seperti tertuang dalam Permentan No. 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/Rc.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029. Renstra Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta 2025-2029 (Draft) memuat perencanaan lima tahunan untuk mendukung arah dan sasaran strategis pembangunan pertanian.

Dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 Kementan RI, maka kebijakan BRMP diarahkan untuk mendukung program strategis Kementan, Strategi Operasional, serta Strategi Pendukung. Melalui Permentan No. 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, BRMP dibentuk untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.

Kementerian Pertanian sebagai salah satu Kementerian Negara, berkontribusi dalam mewujudkan Visi Presiden, maka Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 yaitu **"Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**. Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 ini bermakna bahwa pembangunan pertanian dilanjutkan dengan serangkaian upaya strategis dalam mewujudkan pertanian yang maju sesuai perkembangan zaman. Selain itu, pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Rakyat Indonesia, sehingga dapat mewujudkan Visi Presiden dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.

Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 disusun dalam mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 serta memastikan kontribusi dalam pelaksanaan Asta Cita. Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani;
2. Mendorong Kemandirian Pangan Asal Pertanian;
3. Meningkatkan Nilai Manfaat Produk Pertanian bagi Rakyat Indonesia;
4. Mencegah dan Menangani Penularan Penyakit Hewan kepada Manusia;
5. Meningkatkan Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Berdampak Langsung kepada Masyarakat

Mendukung visi misi Kementerian Pertanian, visi BRMP tahun 2025-2029 adalah **"Mewujudkan lembaga unggul dan berdaya saing global dalam perekayasaan dan modernisasi teknologi pertanian terapan yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan untuk mendukung pertanian Indonesia maju"**. Adapun Misi BRMP tahun 2025-2029 adalah:

1. Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional.;
2. Mengembangkan dan memproduksi prototipe/produk/model teknologi pertanian terapan modern yang efisien, bernilai tambah tinggi, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan;
4. Memfasilitasi diseminasi dan pemanfaatan hasil perekayasaan teknologi pertanian terapan kepada pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian;
5. Membangun kemitraan strategis dan jejaring inovasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, di dalam maupun luar negeri;

Adapun Tujuan BRMP 2025-2029 adalah:

1. Mewujudkan jaminan mutu, keamanan, dan legalitas produk pertanian nasional melalui penguatan penerapan standar teknis dan penilaian kesesuaian guna memperkuat posisi pelaku usaha tani di pasar domestik maupun internasional;
2. Mewujudkan Modernisasi Pertanian melalui Inovasi Teknologi Digital dan Percepatan Hilirisasi Mengakselerasi produktivitas dan efisiensi usaha tani melalui pengembangan teknologi smart farming dan sistem pertanian modern, serta memastikan pemanfaatan hasil perekayasa secara luas melalui diseminasi dan kemitraan strategis guna mendukung swasembada pangan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta tahun 2026 melaksanakan dua program teknis yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, serta Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, serta satu Program Dukungan Manajemen. Sasaran kinerja dengan target *output* tahunan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

2.2. Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2026, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta telah menetapkan target kinerja yang harus dicapai yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta dengan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar **Rp. 5.925.777.000 (Tabel 4)**. PK awal BRMP Jakarta tahun 2026 disusun bulan Desember tahun 2025 (Lampiran 4). PK memuat Lima Sasaran Kinerja dengan Enam Indikator Capaian. Target kinerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta berdasarkan Target DIPA yang terakhir disajikan pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Target kinerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	Jumlah Lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1	Lembaga
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	1	Teknologi
		Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (Unit)	8	Unit
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern (Orang)	125	Orang
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (Nilai)	87.68	Nilai (0-100)
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (Nilai)	95.02	Nilai (0-100)

Tabel 4. Program dan anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta T.A 2026

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 730.000
	a. Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Rp. 730.000
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 251.967.000
	b. Benih Sumber Bawang Merah Spesifik Lokasi	Rp. 38.211.000
	c. Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	Rp. 110.627.000
	d. Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern	Rp. 103.129.000
3	Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.673.080.000
	a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Rp. 5.673.080.000
	Total	Rp. 5.925.777.000

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Utama

Pada tahun anggaran 2026, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta telah menetapkan lima sasaran strategis untuk dicapai. Kelima sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan enam indikator kinerja *output*. Persentase pencapaian target kinerja Triwulan I tahun 2026 berdasarkan sasaran strategis tahun 2026 umumnya masih dalam tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian target. Berdasarkan PK T.A. 2026, capaian kinerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta pada Triwulan I tahun 2026 disajikan pada **Tabel 5** berikut ini:

Tabel 5. Capaian kinerja Triwulan I tahun 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan	Capaian	Kinerja (%)
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1	Lembaga	-	-
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	1	Teknologi	-	-
		Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (Unit)	8	Unit	-	-
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern (Orang)	125	Orang	15	12
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (Nilai)	85.56	Nilai (0-100)	Proses Penilaian Mandiri	-
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (Nilai)	95.02	Nilai (0-100)	75	78.93

Sasaran 1: Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani

Indikator Kinerja 1: Jumlah Lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)

Pencapaian target PK Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta yakni “*Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani*” dicapai melalui kegiatan Program Stategis Kementerian Pertanian, berupa kegiatan Luas Tambah Tanam untuk peningkatan produksi padi dan luas tanam di Provinsi Jakarta. Beberapa metode yang digunakan adalah dengan pendekatan partisipatif kepada Kelompok Tani yang mendapatkan pendampingan. Berupa kegiatan monitoring berkolaborasi dengan *stakeholder* lainnya diantaranya adalah Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, Kodim wilayah dan penyuluh. Pencapaian target luas tanam dilakukan dengan penerapan standar diantaranya adalah SNI IndoGAP. Dalam SNI IndoGAP dipraktikan cara berbudidaya yang baik mulai dari persiapan benih, pengolahan lahan, pemupukan berimbang, Pencegahan hama dan penyakit dan pascapanen.

Pendampingan Penerapan Standar Pertanian

BBPMP Jakarta di tahun 2026 melakukan pendampingan terhadap Poktan Bangkit Bersama untuk menerapkan SNI 8969:2021 IndoGAP dan SNI 6233: 2015 Benih padi Inbrida. Pendampingan diawali dengan sosialisasi tentang standar yang terdapat kedua SNI tersebut, dilanjutkan dengan pendampingan lapangan untuk menerapkan SNI tersebut. Penerapan SNI IndoGAP bertujuan agar praktik budidaya tanaman padi yang sudah dilakukan bertahun-tahun oleh petani di Poktan Bangkit Bersama, dapat dilakukan sesuai standar. Sehingga dihasilkan produk padi yang memiliki peningkatan pada kualitas dan keamanan produknya, efisiensi produk serta berkurangnya dampak negatif terhadap lingkungan sekitar tempat budidaya. Sedangkan Penerapan SNI Benih Padi Inbrida 6233:2015 bertujuan agar benih padi yang dihasilkan dari budidaya Poktan Bangkit Bersama memiliki standar mutu dan klasifikasi benih padi inbrida berdasarkan tingkat kemurnian dan kualitasnya.

Indikator kinerja ini diukur melalui capaian Jumlah Lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan, melalui kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian. Berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan, maka capaian kegiatan ini pada Triwulan I masih dalam tahap pemenuhan capaian (**Tabel 6**).

Tabel 6. Capaian jumlah Lembaga Penerap Standar tahun 2026

Tahun	Target PK	Capaian	Kinerja (%)	Predikat /Kategori
2026	1 Lembaga	0 Lembaga	0	-

Selain Pendampingan Program strategis Kementan, kegiatan lain yang dilaksanakan BBPMP Jakarta adalah pendampingan kepada kelompok usaha tani melalui pameran, *display*/percontohan penerapan standar, lokakarya dan *event*/pertemuan lainnya; Peningkatan kapasitas penerima diseminasi melalui Forum Pertemuan seperti: bimbingan teknis, pelatihan, dan kegiatan pertemuan lainnya; optimalisasi media cetak, elektronik dan media sosial sangat terkait dengan kegiatan diseminasi lainnya, seperti penyusunan materi penyuluhan, *display*, percontohan penerapan, dan forum pertemuan.

Tabel 7. Teknologi dan SNI yang didiseminasikan BBPMP Jakarta periode Januari s.d. Maret 2026

No	Diseminasi Teknologi/SNI	Tautan	Tanggal Posting	Jangkauan Diseminasi (Viewers)
1	Tabulampot Subur dan Berdaun Lebat, Tapi Tidak Berbunga dan Berbuah, Apa Penyebab dan Solusinya?	https://www.instagram.com/reel/DTgvSBqEyK/	15 Januari 2025	454
2	SNI Produksi Benih Padi Sehat	https://www.instagram.com/p/DT2BNiID9WX/	23 Januari 2025	966
3	Membangun Swasembada Pangan Melalui Urban Farming dan Pertanian Berkelanjutan	https://www.instagram.com/p/DUAbLI-jywn/	27 Januari 2025	5.039
4	Tahukah Kamu Klasifikasi Kelas Benih Berdasarkan Labelnya?	https://www.instagram.com/p/DT_sM2xj7eZ/	27 Januari 2025	993
5	Apa itu Benih Bersertifikat?	https://www.instagram.com/p/DUXKPP_jxsJ/	2 Februari 2026	1.1k
7	PENJELASAN Tentang Label Benih	Jakarta https://bit.ly/415ZWU7	5 Februari 2026	1,532
8	Budidaya Kale menggunakan	https://www.instagram.com/p/DUAbLI-jywn/	10 Februari	1K

	Hidroponik di BRMP Jakarta	gram.com/p/DUKKr_RD5G4/	2026	
9	Budidaya Tanaman Kale Hidroponik	https://www.instagram.com/p/DUKNjhUjzPh/?img_index=1	10 Februari 2026	637
10	Tahukah kamu Bagaimana Persyaratan Sertifikasi Benih?	https://www.instagram.com/p/DUKXaltj5la/?img_index=1	24 Februari 2026	708
11	Siapa yang baru tau kalo masih ada sawah di Jakarta? Beda loh varietasnya sama padi di pedesaan.	https://www.instagram.com/p/DUzq431D8Qt/	25 Februari 2026	863
12	Varietas Padi di Jakarta	https://www.instagram.com/p/DU7ZE2Cj1h3/	28 Februari 2026	1.4K
13	TAHU KAH KAMU Prosedur Sertifikasi Benih ?	https://www.instagram.com/p/DVIVyQPj_Rp/?img_index=1	24 Februari 2026	419
14	Sobat tani, yuk kenalan sama tanaman Terong (Solanum Melongena L.)	https://www.instagram.com/p/DVKjKrKD6HH/	25 Februari 2026	860
15	Budidaya Pakcoy menggunakan Hidroponik di BRMP Jakarta	https://www.instagram.com/p/DU498wAjzPB/?img_index=1	28 Februari 2026	228
16	Nutrisi Pada Tanaman Kelor	https://www.instagram.com/reels/DVfhnW_j-SG/	5 Maret 2026	2.3K
17	Pemeriksaan Pendahuluan Lapang dan Pertanaman pada Sertifikasi Benih	https://www.instagram.com/p/DVsUcN0D0jZ/?igsh=MTB4bnZnZTF3YTB3ZQ%3D	10 Maret 2026	382
18	SNI 9226:2023 Karkas Daging Sapi dan Kerbau	https://www.instagram.com/p/DVxLDS_jxSx/?igsh=MXZqc3dlcndxbHhnMQ%3D	12 Maret 2026	336

Sasaran 2: Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif

Indikator Kinerja 2.a: Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)

Pencapaian target Sasaran kedua PK Balai Besar Modernisasi Pertanian Jakarta yakni “*Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif*” dengan Indikator Kinerja Jumlah teknologi Pertanian yang adaptif dengan output 1 teknologi dapat dicapai melalui Kegiatan Program Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern. Balai Besar Penerapan modernisasi Pertanian Jakarta melalui Teknologi Pertanian yang Adaptif akan menjadi pendamping petani untuk mengadaptasikan teknologi budidaya padi PM AAS yang dikombinasikan dengan penggunaan padi sehat. Kegiatan ini akan melibatkan kerjasama dengan instansi di Dinas KPKP Jakarta seperti Pusbangbenih dan Proteksi Tanaman, PPSHP untuk sertifikasi benih, serta kelompok tani untuk kerjasama budidaya produksi benihnya. Capaian kegiatan tersebut pada Triwulan I masih dalam tahap pemenuhan capaian (**Tabel 8**).

Tabel 8 Capaian jumlah teknologi pertanian yang adaptif tahun 2026

Tahun	Target PK	Capaian	Kinerja (%)	Predikat /Kategori
2026	1 Teknologi	0 Teknologi	0	-

Kegiatan Perekayasa dan Perakitan Teknologi Pertanian Adaptif dirancang untuk menghadirkan teknologi modernisasi pertanian yang adaptif dan bermanfaat langsung bagi pelaku pertanian. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta inovasi teknologi yang relevan, tepat guna, dan mampu meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan, sekaligus mendukung upaya modernisasi dan transformasi sektor pertanian nasional.

Salah satu teknologi adaptif modernisasi yang memungkinkan untuk bisa diterapkan di wilayah Jakarta adalah penggunaan padi benih sehat. Ciri-ciri benih padi sehat mampu tumbuh lebih cepat dan searagam dan memiliki daya adaptasi tinggi terhadap lingkungan perkotaan dengan cemaran air dan udara yang cukup tinggi. Penggunaan benih sehat dapat memutus rantai penyebaran penyakit yang bisa menular.

Balai Besar Penerapan modernisasi Pertanian Jakarta melalui Teknologi Pertanian yang Adaptif akan menjadi fasilitator tersedianya benih padi sehat yang tersertifikasi dan dapat dimanfaatkan oleh petani. Kegiatan ini akan melibatkan kerjasama dengan instansi di Dinas KPKP Jakarta seperti Pusbangbenih dan Proteksi Tanaman, PPSHP untuk sertifikasi benih, serta kelompok tani untuk kerja sama budi daya produksi benihnya.

Capaian kegiatan periode Januari s.d Maret 2026 diantaranya adalah telah dilaksanakan koordinasi dengan Dinas KPKP Jakarta, dengan hasil kedua instansi akan berkolaborasi dan bekerjasama dalam kegiatan ini. Telah dilakukan survei untuk CPCL yaitu di tiga lokasi Jakarta Barat dengan Kelompok Tani Hizbul Wathon dan Karya Tani dan di Jakarta Utara adalah Kelompok Tani Bangkit Bersama.

BBPMP Jakarta telah mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan secara daring oleh sekretariat BRMP dengan topik "Tanam Padi Arkansas" dipimpin langsung oleh Sekretaris BRMP. Disampaikan bahwa sudah diinformasikan oleh Setjen Kementan pada surat yang dikirimkan bulan Desember 2025, bahwa semua BRMP diminta untuk menanam padi menggunakan metode budi daya PM-AAS. Hal ini untuk mendukung diseminasi yang dilaksanakan oleh Menteri Pertanian terhadap semua petani tentang keunggulan metode ini untuk meningkat produktivitas padi. Potensi hasil dari penggunaan metode ini sudah diujicobakan di tiga Lokasi yaitu Gorontalo, KP Muara Bogor, Sulawesi Selatan menghasilkan padi 8-9 ton per Ha berdasarkan hasil ubinan. Dokumentasi kegiatan disajikan pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Kegiatan Perekayasa dan Perakitan Teknologi Pertanian Adaptif

Sasaran 2: Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif

Indikator Kinerja 2.b: Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)

Pencapaian target Sasaran kedua PK Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta yakni "*Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif*" dengan Indikator Kinerja Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan sebanyak 8 unit. Output Kinerja tersebut dapat dicapai melalui dua kegiatan yakni 1) Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi (7 ton) dan 2) Benih Sumber Bawang Merah Spesifik Lokasi (1 ton). Capaian kegiatan tersebut pada Triwulan I masih dalam tahap pemenuhan capaian (**Tabel 9**).

Tabel 9. Capaian Jumlah Benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan tahun 2026

Tahun	Target PK	Capaian	Kinerja (%)	Predikat /Kategori
2026	8 Unit	0 Unit	0	-

Kegiatan perbenihan padi tersertifikasi menggunakan pendekatan partisipatif dan kerja sama antara analis standarisasi, penyuluh, pengawas benih tanaman, POPT dan kelompok tani serta stakeholder terkait untuk berkembangnya varietas unggul padi dari sumber ke pengguna secara cepat, bertahap dan berkelanjutan. Kolaborasi menjadi langkah penting yang dilakukan BBPMP Jakarta untuk memenuhi target output. Capaian kegiatan yang sudah dicapai hingga bulan Maret tahun 2026 diantaranya adalah:

a) Koordinasi dengan Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman

Koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan perbenihan dilakukan ke Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman (P2BPT) Provinsi DKI Jakarta. Tim ditemui langsung oleh Kepala Pusat P2BPT, Hendra Juniarto beserta KTU dan staf terkait. Pada agenda ini disampaikan terkait perubahan nomenklatur BRMP Jakarta yang telah menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta. Selanjutnya disampaikan kegiatan perbenihan yang dimandatkan kepada BRMP Jakarta pada tahun 2026 yaitu benih padi dengan target 7 ton dan benih bawang merah dengan target 1 ton. Koordinasi ini mengupayakan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan perbenihan.

b) Koordinasi dengan kelompok tani penangkar calon kooperator perbenihan padi

BBPMP Jakarta melakukan kunjungan koordinasi ke Kelompok Tani (Poktan) Bangkit Bersama di Rorotan, Jakarta Utara dalam rangka persiapan kegiatan produksi benih sumber padi spesifik lokasi di Wilayah Jakarta. Kegiatan koordinasi ini bertujuan memperkuat program perbenihan padi serta memastikan kesiapan kelompok tani dalam melaksanakan produksi benih padi Inpari 32 dengan kelas benih SS (label ungu). Perwakilan Poktan Bangkit Bersama, Rabat Sihabudin sangat terbuka dan siap berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

c) Penyusunan draft Kerjasama kegiatan perbenihan BBPMP Jakarta dengan P2BPT

Maksud perjanjian kerja sama ini adalah bersama-sama memanfaatkan sumber daya yang ada pada BRMP Jakarta dan P2BPT dalam mendukung produksi benih padi inbrida varietas Inpari 30 kelas benih pokok (BP) tersertifikasi sejumlah 5 (lima) ton. Tujuan perjanjian kerja sama adalah untuk menyinergikan program dan kegiatan dalam memproduksi benih padi dan distribusi hasil produksi benih padi inbrida. Dokumentasi kegiatan disajikan pada **Gambar 2**.



Gambar 2. Kegiatan Perbenihan Padi

Sasaran 3: Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani

Indikator Kinerja 3: Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, *smart farming*, dan modern (Orang)

Pencapaian target Sasaran ketiga PK Balai Besar Modernisasi Pertanian Jakarta yakni “Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani” dengan Indikator Kinerja

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta telah memperoleh kategori **Sangat Baik**. Pengolahan data SPKP periode Januari s.d. Maret 2026 menggunakan *excel template*, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta secara agregat atau rata-rata diperoleh nilai Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan sebesar **3.48** dalam skala 4, dengan rincian sebagai berikut (**Tabel 19**). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi publik yang diberikan oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta telah memperoleh kategori **Sangat Baik**.

Tabel 19. Nilai Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan Triwulan I/2026

Uraian	Nilai Unsur Pelayanan							
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8
IPKP per Unsur	3.45	3.61	3.55	3.33	3.53	3.45	3.43	3.45
IPKP Unit Kerja	3.48							

F. Komponen Pengungkit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Komponen ini memiliki target yang harus dicapai dalam peningkatan kualitas layanan, standarisasi pelayanan dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat. Indikator dari komponen ini antara lain adanya kebijakan standar pelayanan, implementasi budaya pelayanan prima serta melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan melakukan tindak lanjut atas hasil survei tersebut.

Sebagai bentuk implementasi budaya pelayanan prima, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta menghadirkan aplikasi PECAK MAS (Pelayanan Elektronik Cepat Akurat Melalui Aplikasi Standardisasi). Kehadiran PECAK MAS diharapkan mendorong layanan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta menjadi lebih cepat dan memberikan kepuasan bagi multi stakeholder. Layanan PECAK MAS bisa diakses melalui Website Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta <https://jakarta.brmp.pertanian.go.id/layanan/layanan-lainnya/pecak-mas-brmp-jakarta> yang terdiri dari layanan: Layanan Konsultasi, Narasumber dan Pelatihan, Layanan Taman Agro Standar (TAS), Layanan PKL/Magang, Layanan Unit Pengelola Benih ter-Standard (UPBS), Informasi Standar Instrumen Pertanian, Layanan Perpustakaan. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta juga menyediakan layanan online melalui aplikasi WhatsApp dan berbagai lini media sosial.

Optimalisasi pelayanan melalui IKM berbasis aplikasi (online/paperless) telah disediakan layanan *linktree* dan scan barcode IKM Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta pada monitor stand di lobi. Penggunaan barcode mempermudah pelanggan untuk menilai kualitas layanan publik Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta dan mempermudah rekapitulasi data IKM yang diberikan.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), menggunakan sembilan (9) indikator yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, yakni: 1) Persyaratan; 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3) Waktu Penyelesaian; 4) Biaya/Tarif; 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6) Kompetensi Pelaksana; 7) Perilaku Pelaksana; 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan 9) Sarana dan Prasarana. Nilai rata-rata konversi IKM Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta dari 9 (Sembilan) unsur pelayanan pada triwulan I T.A 2026 yaitu 90,10 dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik). **Tabel 20** memperlihatkan Mutu Pelayanan BPMP Jakarta Periode Januari s.d Maret 2026.

Tabel 20. Mutu Pelayanan BBPMP Jakarta Periode Januari s.d. Maret 2026

No	Unsur Pelayanan	Nilai Konversi IKM Per Unsur	Kategori
1	Persyaratan (U1)	89,67	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2)	88,04	Baik
3	Waktu Penyelesaian (U3)	89,13	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif (U4)	93,48	Sangat Baik
5	Produk/Jenis Layanan (U5)	88,59	Sangat Baik
6	Kompetisi Pelaksana (U6)	90,76	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana (U7)	92,39	Sangat Baik
8	Penanganan saran, Keluhan, dan Pengaduan (U8)	89,67	Sangat Baik
9	Prasarana dan Sarana (U9)	89,13	Sangat Baik
Nilai IKM		90,10	Sangat Baik

Sasaran 5: Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Indikator Kinerja 5: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (Nilai)

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta yang tertuang dalam dokumen anggaran digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Nilai Kinerja Anggaran ini berdasarkan PMK 214 tahun 2017 yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online SMART yang dibuat DJA Kemenkeu. Sehingga pihak yang melakukan pengukuran IKSK ini adalah Kemenkeu berdasarkan input rencana penarikan, capaian output dan kendala pencapaian *output* Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta pada aplikasi SMART.

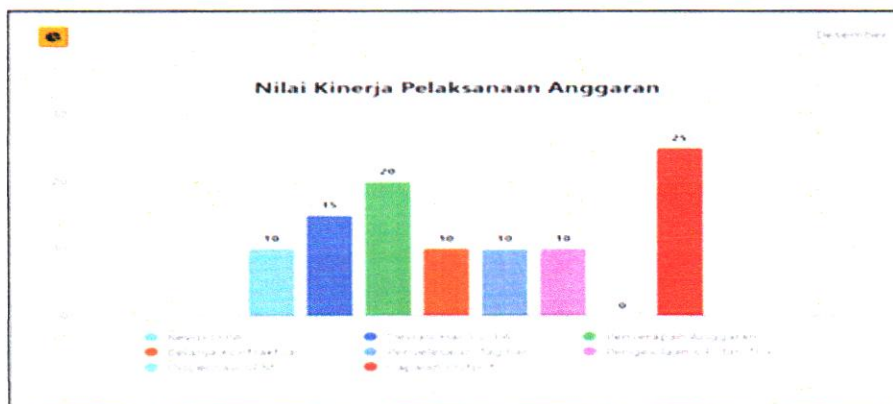
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari aspek kualitas perencanaan anggaran (25%); 2) kualitas pelaksanaan anggaran (50%); dan 3) kualitas hasil pelaksanaan anggaran (25%).

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta per 31 Maret 2026 sebesar 100 (**Tabel 21**). Nilai ini diperoleh dari Nilai Variabel Efektivitas yaitu Capaian Rincian Ouput (75%) sebesar 100; Nilai Penggunaan SBK (10%) sebesar 100; dan Nilai Efisiensi SBK (15%) sebesar 100. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta per 31 Maret 2026 adalah sebesar 75 (**Tabel 21**). Nilai ini diperoleh dari Nilai Revisi DIPA (10%) sebesar 100,00; Nilai Deviasi Halaman III DIPA (15%) sebesar 100; Nilai Penyerapan Anggaran (20%) sebesar 100,00; Nilai Pengelolaan UP dan TUP (10%) sebesar 100; dan Nilai Capaian Output (25%) sebesar 0,00 (**Gambar 3**). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Triwulan I dalam tahap pemenuhan capaian dari nilai target sebesar 95.02, dengan presentase capaian 78.93% (**Tabel 22**).

Tabel 21. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPMP Jakarta Per 31 Maret 2026

No.	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	100	75	100



Gambar 3. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Per 31 Maret 2026

Tabel 22. Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan (IKPA) Tahun 2024 s.d. Tahun 2026 (Triwulan I)

Tahun	Target PK	Capaian NK Pelaksanaan Anggaran	Kinerja (%)	Predikat /Kategori
2024	95.02	96.61	101.67	Sangat Berhasil
2025	95.02	100	105.24	Sangat Berhasil
2026	95.02	75	78.93	-

3.2. Capaian Kinerja Strategis Lainnya

Capaian kinerja strategis lainnya yang diperoleh BRMP Jakarta pada bulan Maret adalah capaian target dari kegiatan Pendampingan Program Strategis/Swasembada Pangan Kementerian Pertanian (Luas Tambah Tanam Padi). Ditinjau dari persentase capaian terhadap target kesanggupan, Provinsi Jakarta berada pada zona merah dengan capaian realisasi sebesar 2,93 % atau hanya sebesar 1 Ha dari target Maret sebesar 34,12 Ha, yang diperoleh dari penambahan pertanaman di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Rendahnya penambahan pertanaman di Jakarta pada bulan Maret disebabkan masih tingginya curah hujan dan banyaknya daerah persawahan Jakarta yang tergenang. Selain itu terdapat alih fungsi lahan sawah di beberapa lokasi, baik di Jakarta Utara, Jakarta Timur, maupun Jakarta Barat, dengan luasan yang beralih fungsi beragam di setiap wilayah. Lahan Poktan Tani Karya Siaga Jakarta Utara seluas ±5 Ha akan dialihfungsikan menjadi rumah susun, lahan sawah Halim Farm beralih fungsi menjadi Barak TNI AU seluas ± 0.5-1 Ha, dan lahan Hizbul Wathon Jakarta Barat juga akan beralih fungsi menjadi lahan pemakaman seluas 40 Ha. Untuk lahan sawah lainnya, umumnya hanya persemaian yang dilaksanakan pada bulan Maret, dengan target tanam pada bulan April. Penyaluran benih padi varietas unggul Inpari telah dilaksanakan kepada Kelompok Tani di Jakarta Utara. Benih yang disalurkan merupakan hasil Diseminasi dari BRMP Padi Sukamandi. Kehadiran benih ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kualitas gabah yang dihasilkan petani. Pada bulan Maret juga telah dilakukan pendampingan oleh Penyuluh Pertanian kepada Gapoktan Rorotan Jaya melalui pertemuan kelompok dengan Babinsa dan Bulog dalam rangka kegiatan Serap Gabah. Bulog berkomitmen untuk menyerap Gabah dari petani. Pendampingan juga dilakukan untuk kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi.

Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian (Luas Tambah Tanam)

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta pada tahun 2026 mendapatkan mandat sebagai penanggung jawab di Provinsi Jakarta pada kegiatan swasembada pangan. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian RI No 166/Kpts/PW.020/M/06/2026 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota

pada Kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan. melalui kegiatan Luas Tambah Tanam Integrasi (LTT Reguler).

Pengembangan komoditas strategis di wilayah Jakarta mempunyai tantangan tersendiri, sehingga perlu adanya pendampingan dan pengawalan yang intensif dan kolaboratif dengan stakeholder terkait agar target luas tambah tanam dan peningkatan produksi padi di tahun 2026 dapat tercapai.

Tim Pendampingan Program Strategis Kementan dari BBPMP Jakarta turun ke lapangan bekerja sama dengan kelompok tani, Babinsa, dan penyuluh dari Dinas KPKP Jakarta. Tujuannya adalah untuk mendampingi petani dalam mengatasi kendala di lapangan saat hendak melakukan kegiatan budidaya tanaman padi. Koordinasi dan komunikasi intensif juga dilakukan dengan gabungan kelompok tani padi maupun kelompok tani secara langsung.

Target luasan tambah tanam adalah 321 ha menurut data ATR BPN untuk tiga wilayah meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Namun berdasarkan data existing lahan garapan riil petani di lapangan luas lahan adalah 232.42 ha. *Output* kegiatan adalah tercapainya peningkatan luas tanam padi sawah di Provinsi Jakarta serta terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani. Fokus utamanya adalah memastikan peningkatan produksi beras nasional guna memperkuat ketahanan pangan. **Tabel 23** memperlihatkan luas lahan sawah garapan petani berdasarkan kelompok tani di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Total luas garapan pada tahun 2026 adalah **232.42** ha, terjadi pengurangan lahan sawah di Jakarta Barat sebesar 40 ha, karena adanya alih fungsi lahan. Selain itu target luas tambah lahan tahun 2026 di Jakarta adalah **641** Ha. Pada **Tabel 24** disajikan hasil capaian LTT di Provinsi Jakarta pada periode Januari s.d Maret 2026.

Tabel 23 Luas lahan sawah garapan petani di Jakarta dengan Target LTT tahun 2026

No	Kotamadya	Kecamatan	Kelompok Tani	Luas Baku Sawah (ha)	Target LTT 2026 (ha)
1	Jakarta Utara	Cilincing	-Karya Siaga	8.66	
			-Subur Abadi	21.9	
			-Makmur Jaya	25.25	
			-Karya Usaha	18.1	
			-Tani Maju	37.16	
			-Bangkit Bersama	34.65	
			-Karang Tengah Jaya	16.75	
			-Maju Bersama	20.2	
			-Marunda Jaya	20.35	
			Jumlah	203.02	469
2	Jakarta Barat	Kalideres	-Rawa Lele	1	
			-Karya Tani	1	
			-Hizbul Wathon	0	
			-Jawa Indah	11	
			Jumlah	13	123
3	Jakarta Timur	Cakung	-Lahan Abadi Ujung Menteng	1.9	
			-Lahan abadi Cakung	3.5	
			-Kandang Besar	1	
			-Sejahtera Jaya	5	
		Makasar	-Tengah Kota (Halim)	5	
			Jumlah	16.4	49
			Total	223.42	641

Tabel 24. Capaian Luas Tambah Tanam Provinsi Jakarta Periode Januari s.d Maret 2026

No	Kotamadya	Kecamatan	Bulan	Luas Tanam (ha)
1	Jakarta Utara	Cilincing	- Januari	9.5
			- Februari	0
			- Maret	0
			Jumlah	9,5
2	Jakarta Barat	Kalideres	-Januari	6
			-Februari	6
			-Maret	1
			Jumlah	13
3	Jakarta Timur	Cakung	-Januari	0
			-Februari	6.9
			-Maret	0
			Jumlah	6.9
		Makasar	-Januari	0
			-Februari	0
			-Maret	0
			Jumlah	6.9
Total				29.4

Monitoring LTT Jakarta Utara

Jakarta Utara memiliki luas baku sawah ±203 ha yang terbagi di dua wilayah yaitu Rorotan dan Marunda. Dokumentasi kegiatan monitoring LTT di Jakarta Utara disajikan pada **Gambar 1**. Luas tambah tanam di Jakarta Utara pada Triwulan I adalah seluas 9.5 Ha. Capaian ini masih cukup rendah, disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah petani pada bulan Januari 2026 masih dalam tahap panen dari hasil tanam di akhir tahun 2025. Selain itu beberapa kendala adalah adanya banjir sehingga sawah tergenang dan jebolnya tanggul, dan terdapat hama seperti keong dan tikus. Terjadi juga alih fungsi lahan di Poktan Tani Karya Siaga seluas ±5 ha yang akan menjadi rumah susun.

Pada Triwulan I juga telah dilakukan pendampingan oleh Penyuluh Pertanian kepada Gapoktan Rorotan Jaya melalui pertemuan kelompok dengan Babinsa dan Bulog dalam rangka kegiatan Serap Gabah. Bulog berkomitmen untuk menyerap Gabah dari petani. Total Gabah yang terserap pada bulan Januari adalah 28.871 kg. Jika dikonversi menjadi padi sekitar 18.766 kg (rendemen ± 65%).

Telah dilakukan penyaluran benih padi varietas unggul Inpari kepada Kelompok Tani di Jakarta Utara. Benih yang disalurkan merupakan hasil Diseminasi dari BRMP Padi Sukamandi. Kehadiran benih ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kualitas gabah yang dihasilkan petani

**Gambar 4.** Monitoring LTT di Jakarta Utara**Monitoring LTT Jakarta Barat**

Jakarta Barat memiliki empat kelompok tani padi yaitu Hizbul Wathan Jawa Indah, Rawa Lele dan Karya Tani. Sampai bulan Maret 2026 luas lahan sawah yang sudah ditanam adalah 13 ha (**Tabel 8**). Target yang ditetapkan oleh Pusdatin Kementan, 2026 Jakarta Barat penambahan tanamnya adalah 123 ha. Pada tahun 2026 terjadi

pengurangan luas baku sawah yang digarap oleh petani dikarenakan adanya alih fungsi lahan sebanyak 40 ha. Kendala pada Triwulan I kegiatan LTT di Jakarta Barat adalah curah hujan yang cukup tinggi yang menyebabkan banjir sehingga padi yang telah disemai menjadi rusak seperti pada Poktan Hizbul Wathon. Luas tambah tanam dihasilkan dari Poktan Hizbul Wathon dan Jawa Indah.

Pada Triwulan I, telah dilaksanakan koordinasi terkait evaluasi bantuan pupuk bersubsidi oleh BPKP. Kelompok Tani di Jakarta Barat juga telah mendapatkan program pupuk subsidi dari Pemerintah.

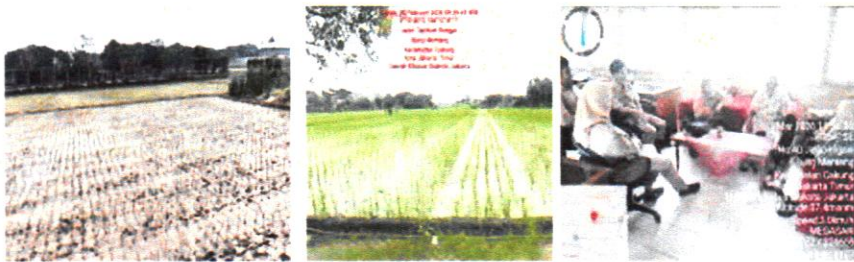


Gambar 5. Monitoring LTT di Jakarta Barat

Monitoring LTT Jakarta Timur

Lahan sawah di Jakarta Timur terdapat di dua kecamatan yang berbeda yaitu Makasar dan Cakung. Terdapat empat kelompok tani yaitu Sejahtera Jaya, Kandang Besar dan Tengah Kota. Luas Baku Sawah di Jakarta Timur adalah 16.4 Ha. Target penambahan tanam yang diterapkan untuk wilayah Jakarta Timur adalah 49 Ha (Tabel 7). Capaian Luas Tambah Tanam yang pada Triwulan I adalah 6.9 Ha.

Telah dilaksanakan kegiatan Koordinasi mengenai penyaluran pupuk bersubsidi di kelompok tani Sejahterah Jaya bersama Satlak cakung, dan petugas Verval Jakarta Timur. Dokumentasi kegiatan monitoring LTT di Jakarta Timur disajikan pada Gambar 3.



Gambar 6. Monitoring LTT di Jakarta Timur

Monitoring Hasil Panen Tahun 2026

Tabel 25 menyajikan data panen padi sawah di Jakarta periode Januari s.d Maret 2026 dengan Total 89.77 ton. Hasil panen diperoleh dari penanaman pada bulan September s.d Desember 2025. Luas panen sawah sebesar 79.98 ha.

Tabel 25. Luas panen serta jumlah produksi padi Provinsi Jakarta Januari-Maret 2026

No	Bulan	Luas Panen (ha)	GKP (ton)
1	Januari	26.85	49.55
2	Februari	21.8	28.45
3	Maret	28.33	11.77
Total		79.98	89.77

Sumber: data primer BBPMP Jakarta

Dalam menjalankan Tupoksinya, pada tahun 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta didukung oleh sumber dana utama yang berasal dari dana APBN, yang tertera dalam DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta nomor SP DIPA-018. 09.2.633961/2024 dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.925.777.000. Anggaran dimaksud digunakan untuk membiayai program utama Balai yang dilaksanakan yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, serta Program Dukungan Manajemen.

Realisasi Belanja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta per 31 Maret 2026 adalah sebesar Rp. 1.229.616.018 (20.75%) yang terdiri dari Realiasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 733.588.352 (22.79%) dan Realisasi Belanja Barang sebesar Rp. 496.027.666 (18.32%) (Tabel 26). Sedangkan realisasi pendapatan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta per 31 Maret 2026 adalah sebesar Rp. 762.500 yang berasal dari Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (Tabel 27).

Tabel 26. Pagu dan Realisasi Belanja Per 31 Maret 2026

Uraian Akun Belanja	2025		
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Belanja Pegawai	3.218.354.000	733.588.352	22.79
Belanja Barang	2.707.423.000	496.027.666	18.32
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Kotor	5.925.777.000	1.229.616.018	20.75
Pengembalian Belanja	0	0	
Total Belanja	5.925.777.000	1.229.616.018	20.75

Tabel 27. Realisasi Pendapatan Per Akun Per 31 Maret 2026

Akun	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan Peternakan dan Budidaya	1.000.000	0	
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	762.500	
Jumlah		1.000.000	762.500	76,25

3.4. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Secara umum, target kinerja Besar Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta pada periode Triwulan I masih dalam tahap pemenuhan capaian dan penilaian mandiri (ZI). Untuk mendukung keberhasilan kegiatan, perlu dukungan faktor internal maupun eksternal. Secara eksternal, keberhasilan pencapaian kinerja perlu didukung oleh adanya koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait, adanya peningkatan respon atas segala umpan balik yang diperoleh, peningkatan kualitas berbagai pelayanan terhadap publik baik layanan kerjasama maupun layanan pengkajian lainnya, serta peningkatan pengelolaan database dan website, sehingga terjalin berbagai kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan, baik dengan institusi pemerintah, masyarakat petani maupun akademisi wilayah Provinsi Jakarta. Sedangkan faktor internal yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja BBPMP Jakarta tahun 2026 antara lain dukungan kerja tim Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta yang mumpuni, dukungan sarana prasarana serta anggaran yang memadai, dan peningkatan manajemen perencanaan dan monitoring evaluasi secara periodik sehingga fungsi kontrol kegiatan dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan capaian juga tidak

terlepas dari kendali Pemantauan dan Evaluasi Pada Rencana Aksi (Renaksi) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang telah disusun pada tahun 2026 yang disajikan pada **Lampiran 8**.

Salah satu permasalahan yang cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan adalah pemotongan anggaran kegiatan untuk RO Khusus Direktif Presiden. Sebagai tindak lanjut dari pemotongan anggaran tersebut, telah dilakukan usulan perubahan volume output sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, revisi anggaran dilaksanakan sebagai tuntutan untuk menyesuaikan struktur anggaran baik revisi yang bersifat arahan langsung dari Sekretariat BRMP dalam mengakomodir kebijakan-kebijakan yang timbul terkait program utama Kementan ataupun revisi yang bersifat penyesuaian dengan kebutuhan operasional Satuan Kerja. Sampai 31 Maret 2026 telah dilaksanakan sebanyak 3 kali revisi yang sebagian besar merupakan revisi yang bersifat arahan langsung dari Sekretariat BRMP dalam mengakomodir arah kebijakan yang berkembang. Secara rinci terkait revisi anggaran BRMP Jakarta dapat dilihat pada **Tabel 28**.

Tabel 28. Rincian revisi anggaran per 31 Maret tahun 2026

No.	Revisi	Keterangan
1.	DIPA awal	DIPA awal sebelum revisi
2.	Revisi 1	Revisi RO Khusus
3.	Revisi 2	Revisi Halaman III DIPA Trwulan I
4.	Revisi 3	Revisi Halaman III DIPA Trwulan I dan Revisi POK

1. Capaian Jumlah Lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan

Kendala lain yang ditemui terkait output capaian luas tambah lahan triwulan I yang ditargetkan sebesar 83,37 Ha dan hanya tercapai 29,4 Ha atau sebesar 35,26%. Faktor yang menjadi kendala kegiatan diantaranya adalah: Faktor risiko alam dan iklim yakni banjir dan genangan, sebagai wilayah pesisir dengan topografi rendah, sawah di Jakarta Utara sering terendam banjir saat curah hujan tinggi; kedekatan dengan laut membuat risiko intrusi air laut (air payau) cukup tinggi, yang dapat merusak tanaman padi; selain itu, sumber air sering kali tercemar oleh limbah domestik maupun industri. Saluran irigasi yang jebol saat curah hujan tinggi di wilayah Rorotan juga mengakibatkan lahan sawah tergenang banjir, sehingga beberapa lahan penyemaian terendam dan harus menyemai ulang. Tekanan lahan (urbanisasi) dan penyusutan lahan yakni alih fungsi lahan menjadi lahan pemakaman dan pemukiman sangat massif; status kepemilikan sawah yang digarap petani sebenarnya milik pengembang (perusahaan properti) atau pemerintah. Hama dan Penyakit yakni serangan tikus dan burung menyerang secara massif; penyakit tanaman karena kondisi kelembapan yang tinggi di wilayah pesisir sering memicu penyakit seperti blas atau hawar daun bakteri. Kendala Sosial dan Ekonomi yakni biaya produksi tinggi, keterbatasan akses terhadap sarana produksi dan biaya tenaga kerja di Jakarta cenderung lebih mahal dibandingkan daerah pedesaan; regenerasi Petani karena kurangnya minat generasi muda di Jakarta untuk terjun ke sektor pertanian membuat jumlah petani semakin berkurang dan didominasi oleh kelompok usia tua.

Beberapa langkah pemecahan masalah, antisipasi dan strategi mitigasi risiko iklim dan lingkungan diantaranya: manajemen waktu tanam dengan menanam pada awal musim hujan atau awal kemarau sesuai wilayah agroklimat, hindari fase pembungaan terkena hujan deras, gunakan sistem kalender tanam terintegrasi; mengatasi kekeringan dengan memastikan sumber air mencukupi (saluran irigasi/pompa cadangan); menggunakan varietas toleran kekeringan (jika lahan rawan); serta mengatasi banjir/genangan dengan memperbaiki saluran drainase. Sebagai upaya membantu petani, BBPMP Jakarta telah menyalurkan benih diseminasi dari BRMP Padi untuk mengganti semaian yang rusak.

Upaya mitigasi risiko alih fungsi lahan: penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); optimalisasi lahan marginal; perencanaan tata ruang partisipatif;

penguatan ekonomi petani. Upaya mitigasi risiko hama dan penyakit: mengatasi serangan OPT (hama & penyakit) dengan menerapkan pengendalian hama terpadu (PHT); tanam serempak, pengamatan rutin (monitoring mingguan); gunakan varietas tahan OPT tertentu; mengendalikan gulma dengan penyiangan dini dan rutin (15–20 HST dan 40 HST). Pengelolaan pemupukan dengan menggunakan rekomendasi pemupukan berimbang berdasarkan uji tanah.

2.a Capaian Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)

Salah satu kendala terkait capaian jumlah teknologi pertanian yang adaptif adalah arahan program kegiatan yang cukup dinamis. Dalam perencanaan awal, BBPMP Jakarta menetapkan penerapan standar SNI Benih Padi Sehat di petani padi di wilayah Jakarta. Namun sesuai kebijakan dan arahan Menteri Pertanian, BBPMP Jakarta juga akan melaksanakan sistem budi daya PM-AAS atau Pertanian Modern-Advanced Agricultural System, dengan luas lahan sekitar 2 Ha.

Untuk memenuhi arahan tersebut, BBPMP Jakarta sudah mulai menginisiasi kegiatan dengan menginventarisasi lahan-lahan yang sesuai dengan karakteristik PM-AAS. Salah satunya yaitu lahan di Jakarta Timur. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan survey lokasi untuk menganalisa kesesuaian dan kebutuhannya.

2.b Capaian Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (Unit)

Target capaian ini terdiri dari dua kegiatan yaitu benih padi sebanyak 7 ton dan benih bawang merah sebanyak 1 ton. Namun kegiatan perbenihan bawang merah mengalami pengurangan anggaran lebih dari 50% sehingga diusulkan untuk dilakukan pengurangan target output. Kendala yang paling utama dirasakan dalam upaya pemenuhan target capaian ini adalah BBPMP Jakarta tidak memiliki kebun percobaan sendiri, sehingga BBPMP harus mencari petani kooperator, sehingga biaya operasional kegiatan relatif lebih tinggi dibandingkan jika memiliki lahan sendiri. Sebagai salah satu pemecahan masalah ini, BBPMP Jakarta sudah menginisiasi kerja sama kegiatan perbenihan dengan P2BPT terkait pemakaian lahan dan sumber daya manusia, serta petani kooperator lain di Poktan Bangkit Bersama.

3. Capaian Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, *smart farming*, dan modern (Orang)

Kendala terkait indikator kegiatan ini diantaranya tidak adanya anggaran khusus yang dapat digunakan untuk mencapai target jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, *smart farming*, dan modern. Sebagai tindak lanjut pemecahan masalah, salah satu solusinya yaitu BBPMP Jakarta akan melaksanakan penderasan informasi terkait modernisasi pertanian melalui layanan zoom meeting dengan target peserta petani-petani wilayah Jakarta yang terdaftar dalam Simluhtan. Materi akan diklasifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan petani.

4. Capaian Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta

Penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dapat berhasil apabila didukung oleh komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari pimpinan unit kerja. Pimpinan berperan sebagai teladan dalam penerapan nilai-nilai integritas, mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta memastikan seluruh jajaran memahami dan melaksanakan program ZI secara konsisten. Selain itu, keterlibatan aktif seluruh pegawai menjadi faktor penting dalam mewujudkan perubahan berkelanjutan melalui kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, peningkatan kinerja, serta penguatan integritas individu dan organisasi.

Keberhasilan penerapan ZI juga ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan enam area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan area perubahan tersebut harus didukung dengan perencanaan yang terukur, pemanfaatan teknologi informasi, inovasi berkelanjutan, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berjalan secara optimal. Dengan sinergi antara komitmen pimpinan, partisipasi pegawai, tata kelola yang baik, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, penerapan Zona Integritas dapat berjalan efektif dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Keberhasilan ZI ditopang oleh perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada integritas, profesionalisme, serta pelayanan prima. Zona Integritas tidak dipandang sebagai pemenuhan dokumen administratif semata, melainkan sebagai upaya nyata dalam membangun perilaku aparatur yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Hal ini diwujudkan melalui internalisasi nilai-nilai integritas, penguatan peran agen perubahan, serta penerapan inovasi yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja dan kualitas layanan.

Dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, masih dijumpai sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas implementasi. Salah satu kendala utama adalah belum optimalnya komitmen dan konsistensi pimpinan serta pegawai dalam menerapkan nilai-nilai integritas secara berkelanjutan. Pembangunan ZI masih dipersepsikan sebagai kegiatan administratif dan berorientasi pada pemenuhan penilaian, sehingga perubahan perilaku dan budaya kerja belum sepenuhnya terinternalisasi.

Kendala lainnya terkait dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Resistensi terhadap perubahan, kebiasaan kerja lama, serta rendahnya pemahaman pegawai terhadap substansi ZI menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai integritas yang belum merata di seluruh lapisan pegawai.

Dari aspek tata kelola dan manajemen, belum optimalnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan pengendalian internal menjadi kendala signifikan. Pada aspek manajemen sumber daya manusia, kendala muncul dalam bentuk penempatan pegawai yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi, serta penerapan sistem penilaian kinerja yang belum sepenuhnya objektif dan terukur.

Kendala lain yang turut mempengaruhi adalah pengelolaan risiko dan pengendalian gratifikasi yang belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Identifikasi risiko korupsi pada proses bisnis dan layanan belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik, serta pemahaman pegawai mengenai pencegahan benturan kepentingan dan gratifikasi masih perlu ditingkatkan.

Di bidang pelayanan publik, tantangan yang dihadapi antara lain belum optimalnya kualitas dan inovasi layanan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta pengelolaan pengaduan masyarakat yang belum sepenuhnya cepat dan tuntas. Secara keseluruhan, kendala-kendala tersebut menunjukkan perlunya penguatan komitmen, konsistensi pelaksanaan, serta sinergi seluruh unsur organisasi agar pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, diperlukan strategi yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Langkah utama yang harus dilakukan adalah penguatan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, yang diwujudkan melalui keteladanan pimpinan, penetapan kebijakan internal yang mendukung integritas, serta pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program ZI.

Penguatan manajemen perubahan dan internalisasi budaya integritas, dilakukan melalui sosialisasi berkelanjutan, peningkatan peran agen perubahan, serta pembinaan pegawai secara sistematis untuk mendorong perubahan pola pikir dan perilaku kerja.

Pada aspek tata kelola, langkah antisipasi dilakukan melalui penyempurnaan dan simplifikasi standar operasional prosedur (SOP) serta penguatan sistem pengendalian internal. SOP disusun secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami, serta dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika organisasi dan kebutuhan layanan.

Strategi berikutnya adalah penguatan manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan kinerja. Dalam rangka pencegahan korupsi, langkah antisipasi dilakukan melalui pengelolaan risiko, pengendalian gratifikasi, dan pencegahan benturan kepentingan. Unit kerja secara aktif mengidentifikasi dan memetakan risiko korupsi pada setiap proses bisnis dan layanan, serta menetapkan langkah mitigasi yang efektif. Sosialisasi dan penegakan kebijakan pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pegawai.

Di bidang pelayanan publik, strategi diarahkan pada peningkatan kualitas dan inovasi layanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penetapan standar pelayanan yang jelas, penyederhanaan prosedur, serta pengembangan inovasi layanan terus didorong untuk meningkatkan kepuasan pengguna.

Melalui pelaksanaan strategi dan langkah antisipasi tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, pembangunan Zona Integritas diharapkan dapat berjalan efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta kepercayaan masyarakat.

5. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta

Tercapainya Kinerja Pelaksanaan anggaran BPMP Jakarta triwulan I hingga saat ini merupakan wujud kerjasama yang baik antara tim perencana anggaran, tim pelaksana anggaran serta kuasa pengguna anggaran. Tim Perencana anggaran membuat serta menyusun perencanaan yang baik serta terjadwal. Selanjutnya pelaksana anggaran melaksanakan kegiatan realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Dukungan dari kuasa pengguna anggaran sangat diperlukan untuk pencapaian target yang sudah direncanakan.

Pada triwulan I tahun 2026 capaian nilai yang didapat sudah diupayakan optimal, demikian pula mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta dukungan dari kuasa pengguna anggaran sudah berjalan dengan baik dan optimal. Maka upaya yang harus dilakukan selanjutnya adalah bagaimana untuk dapat mempertahankan keberhasilan di tahun ini.

Dalam rangka mempertahankan capaian yang harus dilakukan adalah terus menjaga konsistensi kegiatan pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun. Dalam proses perencanaan, tim harus merencanakan anggaran sesuai dengan ketentuan serta perundangan yang berlaku. Tim Pelaksana anggaran harus terus merealisasikan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Dukungan kuasa pengguna anggaran dengan memberikan pantauan, monitoring serta evaluasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.

4.1. Ringkasan Capaian Kinerja

Kepala Besar Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta menetapkan target kinerja tahunan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 antara Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta kepada Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta menetapkan lima sasaran yang harus tercapai: 1) Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani (Lembaga); 2.a) Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif (Teknologi); 2.b) Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif (Unit); 3) Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani (orang); 4) Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima (Nilai); serta 5) Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta didukung oleh sumber dana utama yang berasal dari dana APBN yang tertera dalam DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta T.A. 2026 dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.925.777.000 yang digunakan untuk membiayai program utama yaitu 1) Program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp. 730.000; 2) Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp. 251.967.000 serta 3) Program dukungan manajemen sebesar Rp. 6.673.080.

Indikator kinerja tahun 2026 meliputi: 1) Jumlah Lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 2.a) Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi); 2.b) Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (Unit); 3) Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, *smart farming*, dan modern (Orang); 4) Indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta dengan proses penilaian umumnya di triwulan IV; dan 5) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (Nilai) dengan capaian triwulan I sebesar 75 dengan persentase capaian adalah 78.93%. Capaian fisik kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta pada Triwulan I tahun anggaran 2026 sebagian besar masih dalam tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan menuju pencapaian sasaran.

Realisasi Belanja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta per 31 Maret 2026 adalah sebesar Rp. 1.229.616.018 (20.75%) yang terdiri dari Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 733.588.352 (22.79%) dan Realisasi Belanja Barang sebesar Rp. 496.027.666 (18.32%).

4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Hingga saat ini, Balai Penerapan Modernisasi Jakarta telah menjalani tugas fungsinya untuk *melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian*. Dalam upaya meningkatkan daya guna hasil kegiatan, Balai Penerapan Modernisasi Jakarta juga terus meningkatkan jalinan kerjasama dengan berbagai pihak, dalam rangka akselerasi penerapan dan penyebaran hasil perakitan dan perekayaan paket teknologi spesifik Lokasi serta modernisasi Pertanian.

Dalam pelaksanaan kegiatan, kendala utama yang ditemui adalah keterbatasan lahan yang diperburuk dengan tingkat alih fungsi lahan yang tinggi serta kendala yang berkaitan dengan cuaca/faktor alam. Umumnya lahan di Jakarta rawan banjir, sehingga kadang mengakibatkan gagal semai dan harus mengulang penyemaian. Selain itu, fokus utama pertanian perkotaan Jakarta adalah pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang pertanian khususnya teknologi modern untuk memenuhi standar tinggi dan peningkatan produksi yang dibutuhkan dalam skala global. Penerapan Standar maupun modernisasi pertanian di Jakarta diterapkan untuk produk segar dan olahan (UMKM), untuk meningkatkan mutu produk dan daya saingnya di pasar global.

Dalam rangka peningkatan kinerja 5 tahun mendatang, berdasarkan Renstra Kementan tahun 2025-2029, serta mendukung Renstra BRMP maka Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka rencana peningkatan kinerja tahun 2025 s.d 2029. IKU Balai Besar Penerapan Modernisasi Jakarta yang telah disusun disajikan pada **Tabel 31**. Manual IKU disajikan pada **Lampiran 7**.

Peran penting BRMP adalah mendukung Penerapan dan Pemanfaatan Teknologi Modern, yang akan mendukung Swasembada Pangan. Maka Balai Besar Penerapan Teknologi Pertanian Jakarta akan berpartisipasi dalam output tersebut. Adapun Ruang Lingkup Kriteria Pertanian Modern yang ditargetkan BRMP adalah :1) Penerapan Varietas Unggul Baru yang merupakan hasil inovasi pemuliaan tanaman; 2) Mekanisasi Pertanian dengan penggunaan Alsintan; 3) Sistem Informasi Pertanian (SIP) dengan penerapan teknologi digital; dan 4) Teknologi Pertanian diantaranya dengan mekanisasi digitalisasi seperti *smart farming* dan irigasi modern. Maka untuk peningkatan kinerja di tahun selanjutnya, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta akan terus melaksanakan pendampingan, kolaborasi, diseminasi, bimbingan teknis, gerakan literasi digital, maupun edukasi pemanfaatan aplikasi untuk transaksi dalam rangka pemanfaatan maupun penerapan pertanian modern spesifik lokasi oleh petani.

STRUKTUR ORGANISASI

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta

Dr. Sri Sasmita Dahlan, SP., M.Si
Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Jakarta

Angela Tesalonika Tombuku, S.Pt., M.Sc
Kepala Bagian Tata Usaha

Ikrarwati, SP., M.Si
Kepdik. Peningkatan dan Pemertanian Riset

Chery Soraya Ammanillah, SP., M.Si
Kepdik. Program dan Pengujian

Dr. Tezar Ramdhan, STP., M.Eng
Kepdik. Peningkatan dan Penelitian Kelternakuran

Lampiran 2. Tim Penyusun Laporan Kinerja Balai tahun 2026



BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN JAKARTA

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA
NOMOR: 01/KPTS/OT.040/H.12.12/01/2026
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PERSONALIA
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA**

- Mendukung:**
- kurang dalam rangka melaksanakan tugas dari tugas khusus Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta, dipandang perlu menetapkan Susunan Personalia Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta tahun 2026;
 - Bahwa atas dasar tersebut diatas dipandang perlu menetapkan perubahan personalia yang mutakhir dan cakap untuk melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing masing.
- Mengingat:**
- Tundjung Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Balai Penelitian dan Modernisasi Pertanian;
 - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 101/Kpts/K/2023 tentang Pembentukan, Penastabatan, dan Pengangkatan Pejabat Administrasi dan Pejabat Pengawas Lingkup Balai Penelitian dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
- PERTAMA** Susunan Personalia Tahun 2026 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta;
- KEDUA** Personalia sesuai lampiran surat ini melaksanakan tugas sesuai arahan pimpinan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya serta melaporkan hasil kerjanya sesuai ketentuan kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta;
- KETIGA** surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 Januari 2026**

Dr. Sri Sasmita Dahlan, S.P., M.Si
Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
Kantor Bersejarah Anggarani



Dr. Sri Sasmita Dahlan, S.P., M.Si
NIP 198303192005012001

Endorse:
Kepala Balai Penelitian dan Modernisasi Pertanian
Yang bersangkutan

Keperluan: Survei Keperluan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
 Tanggal: 02 Januari 2026
 Nomor: 01/KPTTA/PT/2026/01/02/01/2026

No	Struktur Personalia	Pejabatnya
I	Kepala Balai	Dr. Sri Sasmita Dahlan, S.P., M.Si
II	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggella T. Tombuku, S.P., M.Sc
III	Pejabat Pembuat Komitmen	Budiyanoro, S.TP., M.Sc
IV	Bendahara	Sudiyah, A.Md
V	Tim Kerja	
1	Tim Kerja Program, Evaluasi dan Pendampingan Modernisasi Pertanian	
	Ketua Tim	Chery Rosaya Ammatillah, S.P., M.Si
	Anggota	
	a. Sekretaris Direktorat Jenderal Pertanian	Dr. Neta Atika Sudjana, M.Si
	b. Kepala Seksi Monev, Pengaplikasian, Rencana Kegiatan dan Pelaksanaan	Wella Susana Marlita, S.P., M.M
	c. Direktorat Kemitrahan, Jejaring dan Hub	Yusuf Harahmuni, S.TP.
	d. Direktorat Aplikasi dan Sistem Informasi	Karim Huseinawan, A.Md
	e. Tim Kerja dan Monev dan Penganggaran	Wahid Fauzan Nurwaga, S.P., M.Si
	f. Penganggaran	
	g. Penanggungjawab Operasi Anggaran	David Dharma Alifurrahman, S.P.
2	Tim Kerja Layanan, Kerjasama dan Penerapan Modernisasi Pertanian	
	Ketua Tim	Ikhurwati, S.P., M.Si
	Anggota	
1	Tim Pengelola Perpustakaan	
	a. Tim Pengelola Layanan Perpustakaan	Rahmatulloh, S.P.
	b. Seksi Publikasi	Adhinda Hanik, S.Si, M.Si
	c. Layanan Pengkajian Informasi dan Publikasi	Katiga Direswita, A.Md
2	Tim Pengelola Laboratorium dan Pengujian Pasca Panen	
	a. Tim Pengujian Pasca Panen	Samsi Iqbal Masduki, S.TP., M.Si
	b. Tim Pengujian Pasca Panen	Yusuf Fauzan, A.Md
	c. Monev dan Penganggaran	Prasidha Firdausy, S.P., M.Si, Peng. 13/01/2026

Lampiran 3. SOP Laporan Kinerja BBPMP Jakarta



KEMENTERIAN PERTANIAN RI
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA

Dasar Hukum

- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Terganas
- Peraturan Menteri Pertanian No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengaplikasian Kinerja Petani
- Peraturan Menteri Pertanian No. 53 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pertanian No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akreditasi Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pertanian No. 20 Tahun 2014 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Kementerian Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) BRMP

Keterangan

- SOP Laporan Kinerja
- SOP Laporan Tahunan

Peringatan

- Jika SOP ini tidak dilaksanakan mengakibatkan:
 - Tidak terdapat laporan kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
 - Tidak terdapat data kinerja untuk AKIP

Nomor SOP: **SKP/BBPMP/2020/01**
 Tanggal Pendokumen: **1 April 2020**
 Tanggal Revisi: **0**
 Tanggal Efektif: **01 April 2020**
 Tanggal Dibatalkan: **01 April 2020**

Nama SOP: **Laporan Kinerja**

Kualifikasi Pelaksana

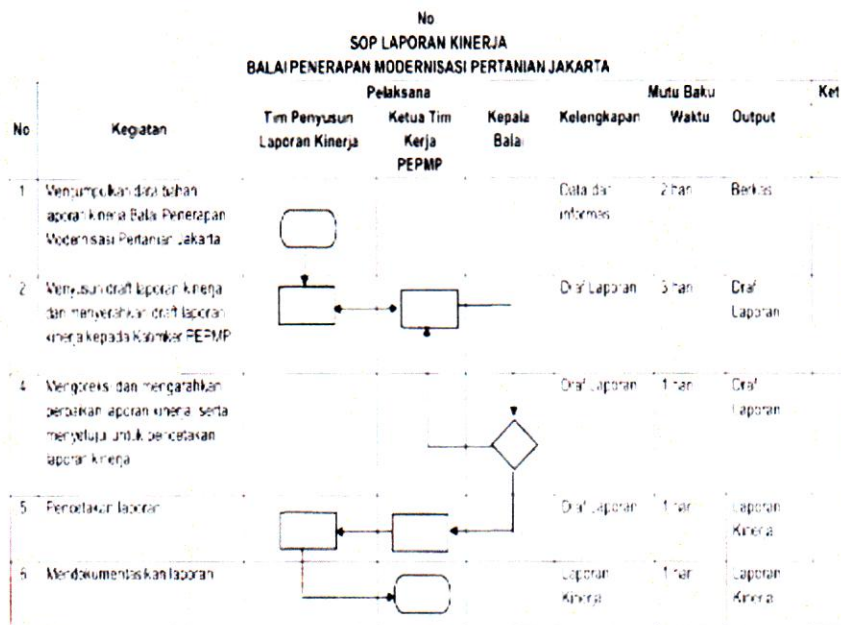
- Memahami prosedur pelaksanaan AKIP
- Memiliki pengetahuan tentang SKIP
- Memiliki pengetahuan tentang persyaratan teknis dan persyaratan data

Peralatan/Penengkapan

- Perangkat komputer dan ATK

Pencatatan dan Pendataan

- LAMK



**Lampiran 4. Penetapan Perjanjian Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian
Jakarta T.A. 2026 (awal)**



Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Sasmita Dahlan
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	
Fadry Djufry	Sri Sasmita Dahlan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
UTAMA				
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan lembaga	1	Lembaga
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	1	Teknologi
		Jumlah bibit/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (Unit)	8	Unit
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Orang)	125	Orang
LAINNYA				
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (Zi) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (Nilai)	81,68	Nilai
5	Tersedianya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (Nilai)	95,02	Nilai

Kode	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	730 000
7911	Standardisasi dan Pelatihan Kesiapan Bidang Pertanian	Rp	730 000
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	443 913 000
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp	443 913 000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp	6 173 358 000
6918	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp	6 173 358 000
		Rp	6 618 001 000

Salat anggaran terdistribusi ke Balai RP, yaitu terdiri dari:

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp 730.000
- Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp 443.913.000
- Program Dukungan Manajemen Rp 6.173.358.000

Phak Kedua

Jakarta, 31 Desember 2025
Phak Pertama



Hadry Djufri

Sri Sasmita Dhanan

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PROVINSI JAKARTA

Sasaran dan Indikator Kinerja: BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PROVINSI JAKARTA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1. Jumlah lembaga penerac standar yang mendapalkan pendampingan (Jumlah)	Lembaga
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2. Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi) 3. Jumlah benih bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan	Teknologi Unit
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	4. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Jumlah)	Orang
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	5. Nilai Penguatan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (Nilai)	Nilai
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (Nilai)	Nilai

Lampiran 6. Rencana Aksi BBPMP Jakarta 2026

TABEL KENDALI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
RENCANA AKSI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA TA. 2025

[illegible]

Lampiran 7. Surat edaran Setjen Kementan tentang Kriteria Pencapaian Kinerja



KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Raya Setiabudi No. 1, Jakarta Selatan 12130
Telp. (021) 57171000, 57171001, 57171002, 57171003, 57171004, 57171005
Faks. (021) 57171006, 57171007, 57171008, 57171009, 57171010
Email: sekretariat@kementan.go.id

Yth,

1. Inspektur Jenderal,
 2. Direktur Jenderal,
 3. Kepala Badan,
 4. Kepala Biro/Pusat,
 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis
- Lingkup Kementerian Pertanian
di tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 1003/SE/RC.030/IA/04/2023

TENTANG

KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

Dalam rangka evaluasi kinerja organisasi lingkup Kementerian Pertanian, maka dilakukan pengukuran capaian indikator kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan di awal tahun melalui Perjanjian Kinerja (PK). Atas dasar hal tersebut, perlu penetapan kategori capaian kinerja melalui metode *scoring* dengan mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

No	Nilai Scoring	Predikat/Kategori
1	>100 %	Sangat Berhasil
2	80-100 %	Berhasil
3	60 – 79 %	Cukup Berhasil
4	< 60 %	Kurang Berhasil

Demikian untuk dapat menjadi perhatian dan agar Surat Edaran ini dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 15 April 2023
Sekretaris Jenderal,

Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.
NIP. 196405211990031001

Tembusan:
Menteri Pertanian